

**LAPORAN KINERJA  
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN  
KAWASAN PERMUKIMAN  
KABUPATEN MAGETAN  
TAHUN 2025**



**DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN  
TAHUN 2026**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya penyusunan Laporan Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Magetan Tahun 2025 dapat terselesaikan.

Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Magetan terhadap keberhasilan dan/atau kegagalan organisasi untuk mencapai Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan serta kontribusi dalam mewujudkan Visi dan Misi Bupati Magetan. Di samping itu, laporan ini memuat informasi secara transparan tentang pelaksanaan program dan kegiatan sampai dengan pencapaian sasaran dalam rangka mewujudkan tujuan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Magetan yaitu menjamin berkelanjutan program dan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam perubahan Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Magetan Tahun 2025-2029 dan memberikan pedoman bagi seluruh unit di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Magetan dalam melaksanakan program/kegiatan untuk mencapai target sasaran Renstra.

Tujuan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah untuk menciptakan pemerintahan yang baik dan terpercaya. Laporan kinerja juga dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi yang obyektif bagi pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) dalam menilai capaian kinerja dan pertanggungjawaban Instansi Pemerintah guna meningkatkan kinerja sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan lebih lanjut.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2025 ini masih banyak kekurangan atau masih jauh dari sempurna, untuk itu saran dan masukan yang bersifat membangun demi sempurnanya penyusunan Laporan Kinerja ini sangat kami harapkan yang nantinya akan kami pergunakan sebagai bahan penyempurnaan dalam penyusunan Laporan Kinerja di tahun mendatang.

Magetan, 5 Maret 2026

Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan  
Kawasan Permukiman  
Pemerintah Kabupaten Magetan



**SUDIRO, ST. MT**

Pembina Tingkat I / IVb

NIP. 197003042002121009

## **DAFTAR ISI**

KATA PENGANTAR.....	1
DAFTAR ISI .....	2
BAB I PENDAHULUAN .....	4
A.    LATAR BELAKANG .....	4
B.    KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI.....	5
C.    TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI.....	6
D.    SUMBER DAYA ORGANISASI .....	6
1.    Kepegawaian.....	6
2.    Sarana dan Prasarana .....	9
3.    Anggaran (setelah perubahan) .....	9
E.    IDENTIFIKASI PERMASALAHAN UTAMA PERANGKAT DAERAH .....	10
F.    LANDASAN HUKUM .....	10
G.    SISTEMATIKA PENYAJIAN .....	11
BAB II PERENCANAAN KINERJA .....	13
A.    RENCANA STRATEGIS TAHUN 2024-2026 (Berdasarkan RPD 2024-2026) .....	13
1.    Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja Tahun 2024-2026 (berdasarkan Renstra RPD ) .	14
2.    Strategi dan Arah Kebijakan Tahun 2024-2026 .....	16
3.    Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2024-2026.....	18
B.    RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029 (Berdasarkan RPJMD 2025-2029).....	21
1.    Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja Tahun 2025-2029.....	22
2.    Strategi dan Arah Kebijakan Tahun 2025 -2029.....	23
3.    Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2025-2029.....	25
C.    RENCANA KERJA DAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025.....	31

D.	RENCANA KERJA DAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025 .....	38
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....</b>		<b>46</b>
A.	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025.....	47
1.	Target dan Realisasi Kinerja (Induk) dan Perubahan Tahun 2025 .....	47
2.	Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2025 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;.....	59
3.	Perbandingan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun 2025 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;.....	62
1.	Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2025 dengan standar nasional, standar Provinsi atau capaian kinerja Pemerintah Daerah sekitarnya; .....	63
2.	Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan: .....	63
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>		<b>70</b>
A.	SIMPULAN .....	70
B.	RENCANA AKSI TAHUN 2026 .....	72
<b>LAMPIRAN .....</b>		<b>75</b>
A.	Matriks Renstra RPD dan RPJMD .....	75
B.	Indikator Kinerja Utama RPD dan RPJMD .....	127
C.	Matriks Renja Tahun 2025 dan Perubahannya.....	134
D.	Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah Tahun 2025 dan perubahannya.....	136
E.	Pengukuran Kinerja.....	138
F.	Pohon Kinerja .....	140
G.	Rencana Aksi Tahun 2026.....	141

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Laporan Kinerja tahun 2025 adalah capaian kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) perangkat daerah yang sudah ditetapkan di dalam Perjanjian Kinerja (PK) perangkat daerah tahun 2025 secara berjenjang yang menggambarkan hasil-hasil yang utama dan kondisi yang seharusnya, tanpa mengesampingkan indikator lain yang relevan. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman selaku unsur pembantu Bupati, khususnya dalam bidang Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman serta Bidang Prasarana Sarana Utilitas Umum (PSU) dan Pertanahan dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebagai sub sistem dari sistem Pemerintahan Daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Magetan diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan LKjIP Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Magetan Tahun 2025 bertujuan untuk:

1. Sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan;

2. Sumber informasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dengan pembandingan hasil pengukuran kinerja dan penetapan kinerja;
3. Bahan evaluasi untuk penyusunan rencana kegiatan dan kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman pada tahun berikutnya.

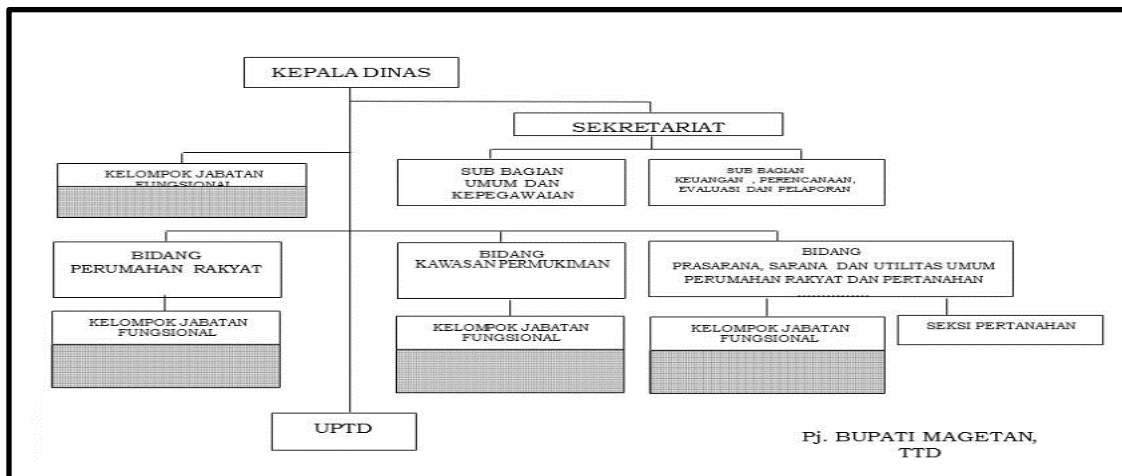
**B. KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI**

Berdasarkan Peraturan Bupati Magetan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Magetan pada pasal 2, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman serta Bidang Prasarana Sarana Utilitas Umum (PSU) dan Pertanahan yang menjadi kewenangan Daerah. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dipimpin oleh Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Susunan Organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman terdiri atas:

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat
3. Bidang Perumahan
4. Bidang Kawasan Permukiman
5. Bidang Prasarana Sarana Utilitas Umum (PSU) dan Pertanahan

Berikut bagan susunan organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Magetan.

Gambar 1.1.  
Susunan Organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman\ Kabupaten Magetan



### C. TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Bupati Magetan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Magetan pada pasal 4, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan.

Dalam menyelenggarakan tugasnya tersebut Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta bidang pertanahan;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta bidang pertanahan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta bidang pertanahan;
- d. Pelaksanaan koordinasi umum administrasi dinas di bidang perumahan rakyat serta dan kawasan permukiman serta bidang pertanahan; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

### D. SUMBER DAYA ORGANISASI

#### 1. Kepegawaian

Berjalannya organisasi sangat ditentukan oleh kuantitas maupun kualitas sumber daya manusia aparatur. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, sampai dengan tanggal 31 Desember 2025, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman didukung oleh pegawai sebanyak 44 orang, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Rencana Kebutuhan dan Realisasi Pegawai

Tabel 1.1.  
Rencana Kebutuhan dan Realisasi Pegawai  
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Magetan  
Per 31 Desember 2025

No.	Jabatan	Kebutuhan (orang)	Realisasi (orang)	Kekurangan/Kelebihan (orang)
1	Kepala Dinas	1	1	0
2	Sekretaris	1	0	1
3	Kepala Bidang Perumahan Rakyat	1	1	0

4	Kepala Bidang Kawasan Permukiman	1	1	0
5	Kepala Bidang Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan Rakyat dan Pertanahan	1	1	0
6	Kepala Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	1	0	1
7	Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian	1	1	0
8	Kepala Seksi Pertanahan	1	1	0
9	Penelaah Teknis Kebijakan	8	4	-4
10	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	4	3	-1
11	Fasilitator Pemerintahan	1	1	0
12	Pengawas Jaringan Utilitas	1	0	-1
13	Pengolah Data dan Informasi	7	1	-6
14	Pengelola Layanan Operasional	5	0	-5
15	Pengadministrasi Perkantoran	11	7	-4
16	Operator Layanan Operasional	19	13	-6
17	JF Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Ahli Pertama	5	4	-1
18	JF Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Ahli Muda	3	2	-1
19	JF Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Ahli Madya	2	2	0
20	JF Penata Ruang Ahli Pertama	1	1	0
21	JF Penata Ruang Ahli Muda	1	0	-1
22	JF Penata Kelola Penyehatan Lingkungan Ahli Pertama	2	0	-2
23	JF Penata Kelola Penyehatan Lingkungan Ahli Muda	1	0	-1
24	JF Penata Kelola Penyehatan Lingkungan Ahli Madya	1	0	-1
25	JF Penata Kelola Perumahan Ahli Pertama	15	0	-15
26	JF Penata Kelola Perumahan Ahli Muda	7	0	-7

27	JF Penata Kelola Perumahan Ahli Madya	3	0	-3
28	JF Arsiparis Terampil	1	0	-1
29	JF Arsiparis Mahir	1	0	-1
30	JF Arsiparis Penyelia	1	0	-1
31	JF Arsiparis Ahli Pertama	1	0	-1
32	JF Perencana Ahli Pertama	2	0	-2
33	JF Perencana Ahli Muda	1	0	-1
	Jumlah	112	44	-68

b. Pegawai Berdasarkan Pangkat/Golongan Ruang

Tabel 1.2.

Pangkat/Golongan Ruang Pegawai  
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Magetan  
Berdasarkan Pangkat/Golongan Ruang Per 31 Desember 2025

No.	Pangkat/Golongan Ruang	Jumlah (orang)
1	Pembina Utama/IVd	-
2	Pembina Utama Muda/IVc	-
3	Pembina Tk.I/IVb	1 Orang
4	Pembina/IVa	6 Orang
5	Penata Tk.I/III d	6 Orang
6	Penata/IIIc	-
7	Penata Muda Tk.I/III b	7 Orang
8	Penata Muda/IIIa	8 Orang
9	Pengatur Tk.I/II d	3 Orang
10	Pengatur/IIc	1 Orang
11	Pengatur Muda Tk.I/II b	-
12	Pengatur Muda/IIa	12 Orang
	Jumlah	44

c. Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tabel 1.3.

Tingkat Pendidikan Pegawai  
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Magetan  
Per 31 Desember 2025

No.	Pendidikan	Jumlah (orang)
1	Strata 3	-
2	Strata 2	5 Orang
3	Strata 1/Sederajat	21 Orang
4	Diploma	-
5	SMA/Sederajat	18 Orang
6	SMP/Sederajat	-
7	SD/Sederajat	-

	Jumlah	44 Orang
--	--------	----------

c. Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Jumlah (orang)
1	Laki-laki	28 Orang
2	Perempuan	16 Orang
	Jumlah	44 Orang

## 2. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana berupa aset tetap yang ada di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman per 31 Desember 2025 dapat dirinci dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 1.4  
Aset Tetap Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Magetan per 31 Desember 2025

No.	Aset Tetap	Per 31 Desember Tahun 2025-1 (Rp)	Mutasi Tahun 2025		Per 31 Desember Tahun 2025 (Rp)
			Bertambah	Berkurang	
1	Tanah	Rp. 51.182.051.539,-	-	-	Rp. 51.182.051.539,-
2	Peralatan dan Mesin	Rp. 2.679.117.243,-	Bertambah	-	Rp. 2.734.967.244,-
3	Gedung dan Bangunan	Rp. 9.151.801.212,-	Bertambah	-	Rp. 11.655.232.852,-
	Jumlah	Rp. 63.012.969.994,-			Rp. 65.572.251.635,-

## 3. Anggaran (setelah perubahan)

Dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Magetan, telah disusun program dan kegiatan dengan anggaran yang telah ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Magetan Tahun 2025 Alokasi anggaran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Magetan Tahun 2025 adalah sebesar Rp. 27.748.170.289,- dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.5  
Anggaran Belanja Dinas Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025 dan 2026

Program	Tahun 2025	Tahun 2026
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 4.709.558.717,-	Rp. 4.966.522.160,-

Program Pengembangan Perumahan	Rp. 413.616.150,-	Rp. 435.650.000,-
Program Kawasan Permukiman	Rp. 13.615.030,450,-	Rp. 4.166.300.000,-
Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Rp. 6.292.664.972,-	Rp. 2.258.000.000,-
Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum	Rp. 2.664.903.750,-	Rp. 5.395.500.000,-
Program Pengelolaan Tanah Kosong	Rp. 26.296.250,-	Rp. 23.500.000,-
Program Penatagunaan Tanah	Rp. 26.100.000,-	Rp. 122.750.000,-

## **E. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN UTAMA PERANGKAT DAERAH**

Permasalahan adalah perbedaan (gap) antara kondisi riil dengan kondisi ideal dan/atau perbedaan antara kondisi riil dengan ekspektasinya. Permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Magetan sesuai tugas dan fungsinya tahun 2025 adalah:

1. Pemenuhan kualitas dan kuantitas Perumahan Dasar, Jalan lingkungan, dan ruang publik; dan;
2. Penatakelolaan Pertanahan yang tertib; tertib dalam hal ini berarti secara inventarisasi maupun legalisasi.

## **F. LANDASAN HUKUM**

Laporan Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Magetan ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 10 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2025 Nomor 145); / Peraturan Bupati nomor: 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026;
4. Peraturan Bupati Magetan Nomor 38 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2025-2029;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 7 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
6. Peraturan Bupati Magetan Nomor 26 Tahun 2024 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025;
7. Peraturan Bupati Magetan Nomor 17 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025; dan
8. Keputusan Bupati Magetan 100.3.4.2/320/Kept./403.013/2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama, Tujuan, Sasaran dan Satuan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Magetan 2025-2029.

## **G. SISTEMATIKA PENYAJIAN**

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Magetan Tahun 2025 berpedoman pada PERMENPAN-RB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dengan sistematika sebagai berikut:

### **BAB I           PENDAHULUAN**

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

### **BAB II           PERENCANAAN KINERJA**

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

### **BAB III          AKUNTABILITAS KINERJA**

#### **A. Capaian Kinerja Organisasi**

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);

5. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).

#### B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

### BAB IV

#### PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

### LAMPIRAN

- 1) Perjanjian Kinerja
- 2) Lain-lain yang dianggap perlu

## BAB II PERENCANAAN KINERJA

### A. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2024-2026 (Berdasarkan RPD 2024-2026)

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Magetan merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari Tujuan Kepala Daerah dan terintegrasi dengan potensi sumber daya dimiliki dalam hal ini Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Magetan. Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Magetan mengalami masa transisi dengan ditetapkan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun yaitu dari tahun 2024-2026.

Adapun Tujuan dan Sasaran Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Magetan yang disusun dalam rangka mendukung Tujuan Bupati Magetan, Sasaran Strategis serta Strategi dan Arah Kebijakan yang tertuang dalam RPD Kabupaten Magetan periode 2024-2026 dapat dirumuskan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.1  
Keterkaitan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Magetan dengan Tujuan, Sasaran Bupati Magetan Tahun 2024-2026

<p>Tujuan (RPD) ke- 3 dan 4</p> <p>Indikator:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.</li> <li>4. Mewujudkan Pembangunan yang berasaskan lingkungan</li> </ul>
<p>Sasaran (RPD) ke- 3 dan 4</p> <p>Indikator:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>3. Mengurangi beban pengeluaran kelompok miskin dan rentan.</li> <li>4. Tercukupinya kebutuhan kawasan perumahan yang layak</li> </ul>
<p>Tujuan (Renstra) ke-</p> <p>Meningkatkan perumahan dan permukiman layak huni</p> <p>Meningkatkan tata kelola Pertanahan untuk Pembangunan Kabupaten</p> <p>Meningkatkan kualitas pelayanan pada Dinas Perkim</p> <p>Indikator:</p>

<p>Persentase perumahan dan permukiman layak huni</p> <p>Persentase pengelolaan tanah untuk pembangunan Kabupaten</p> <p>Indeks IKM</p>
<p>Sasaran (Renstra) ke-</p> <p>Meningkatnya perumahan dan permukiman layak dan terjangkau</p> <p>Meningkatnya Kualitas PSU Perumahan</p> <p>Meningkatnya pengelolaan pertanahan untuk pembangunan kabupaten</p> <p>Meningkatnya kepuasan layanan dinas</p> <p>Indikator:</p> <p><i>Persentase kawasan permukiman layak huni</i></p> <p><i>Cakupan ketersediaan rumah layak huni</i></p> <p><i>Persentase rumah bagi korban bencana yang tertangani</i></p> <p><i>Cakupan lingkungan perumahan yang sehat dan aman yang didukung oleh PSU</i></p> <p><i>Persentase penyelesaian sengketa tanah</i></p> <p><i>Persentase penatagunaan tanah</i></p> <p><i>Persentase pengelolaan tanah kosong</i></p> <p><i>Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan dinas</i></p>

**1. Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja Tahun 2024-2026 (berdasarkan Renstra RPD )**

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Sebagaimana Tujuan yang telah ditetapkan, untuk mendukung keberhasilan tersebut perlu ditetapkan sasaran strategis beserta indikator dan target kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Magetan periode 2024 – 2026. Tujuan dan Sasaran strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Magetan dijabarkan dalam tabel di bawah ini:

**Tabel 2.2**  
**Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja**  
**Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Magetan**  
**Tahun 2024 - 2026**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA PADA TAHUN RENSTRA			
					2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	
1	Meningkatkan perumahan dan permukiman layak huni		Persentase Perumahan dan permukiman yang layak huni	%	88,97	89,09	89,23	
		1.1	Meningkatnya perumahan dan permukiman layak dan terjangkau	Persentase jumlah rumah tangga yang memiliki akses rumah layak huni	%	79,95	80,18	80,45
		1.2	Meningkatnya Kualitas PSU Perumahan	Persentase permukiman layak huni	%	98.00	98.01	98.02
		1.3	Meningkatnya tata kelola pertanahan untuk pembangunan kabupaten	Persentase tata kelola pertanahan untuk pembangunan Kabupaten	%	15	30	45
		1.4	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kualitas Pelayanan Publik	Nilai SAKIP Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan permukiman	skor	89,4	89,6	89,8
			Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	skor	83,1	84,2	84,4	

*Sumber: Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Magetan*

## 2. Strategi dan Arah Kebijakan Tahun 2024-2026

Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Sementara, kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan. Dalam kerangka tersebut, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Magetan merumuskan strategi dan arah kebijakan perencanaan pembangunan daerah secara komprehensif untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra dengan efektif (berdaya guna) dan efisien (berhasil guna), sebagai berikut:

Tabel 2.3  
Strategi dan Arah Kebijakan  
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Magetan  
Tahun 2024-2026

<b>VISI : Magetan Nyaman, Maju, dan Berkelanjutan</b>			
<b>MISI ke- :</b>			
4. Meningkatkan Kesejahteraan dengan pengentasan Kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat, perlindungan sosial dan pembangunan wilayah perdesaan			
6. Membangun Infrastruktur Strategis untuk Mengurangi Kesenjangan antar Wilayah			
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman dan akses masyarakat terhadap perumahan layak huni	Meningkatnya perumahan dan Permukiman layak huni	Penguatan Basis Data dan Sistem Informasi	1. Mengembangkan sistem informasi perumahan dan permukiman berbasis digital yang terintegrasi untuk mendukung perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program 2. Menyediakan data akurat dan terkini terkait kebutuhan rumah, kualitas lingkungan permukiman, dan status lahan asset publik.
		Peningkatan Kualitas Lingkungan Permukiman	1. Mendorong rehabilitasi dan pembangunan infrastruktur dasar permukiman di kawasan prioritas, termasuk penanganan kawasan kumuh

			2. Menjamin ketersediaan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) yang memadai dan berstandar sesuai NSPK nasional
		Perluasan Akses terhadap Rumah Layak Huni	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memfasilitasi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk mengakses rumah layak melalui program bantuan perumahan dan kemitraan strategis dengan pihak swasta</li> <li>2. Mengoptimalkan program rumah swadaya dan rumah subsidi dengan pengawasan mutu konstruksi yang ketat</li> </ol>
		Integrasi Digitalisasi dan Kemitraan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mendorong digitalisasi layanan perizinan dan pelaporan seperti e-siteplan, verifikasi PSU, dan pemetaan aset.</li> <li>2. Menggandeng sektor swasta, komunitas, dan pemangku kepentingan lainnya untuk memperluas cakupan dan keberlanjutan program perumahan</li> </ol>
		Penataan dan Optimalisasi Aset Publik	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menata dan mengelola aset PSU dan lahan publik secara optimal, terdata, dan terdigitalisasi agar pemanfaatannya lebih efektif.</li> <li>2. Menyusun regulasi dan kebijakan turunan yang mendukung tata kelola asset berbasis transparansi dan akuntabilitas</li> </ol>

		Evaluasi dan Penyempurnaan Kebijakan Berbasis Data	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan evaluasi rutin berbasis indikator kinerja untuk menilai efektivitas program dan kegiatan</li> <li>2. Menyempurnakan kebijakan dan program berdasarkan hasil evaluasi dan perkembangan kebutuhan masyarakat</li> </ol>
Meningkatnya Akuntabilitas dan pelayanan publik penyelenggaraan pemerintahan daerah pada Dinas Perumahan Rakyat Kawasan	Meningkatnya Akuntabilitas dan pelayanan publik penyelenggaraan pemerintahan daerah pada Dinas Perumahan Rakyat Kawasan	Meningkatkan kualitas tata kelola administrasi pemerintahan dan pelayanan dinas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan pemenuhan standar pelayanan dan SOP pelayanan</li> <li>2. Meningkatkan ketepatan waktu pelaksanaan administrasi pemerintahan dan pelayanan.</li> </ol>

### 3. Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2024-2026

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah. Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Magetan tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.4**  
**Indikator Kinerja Utama**  
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Magetan  
tahun 2024-2026

TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	PENJELASAN		
				DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
Meningkatnya kualitas perumahan dan kawasan permukiman	1.	Persentase perumahan dan kawasan permukiman yang layak huni	%	Penyediaan perumahan dan kawasan permukiman yang layak huni	Luasan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang layak Huni tertangan/ Luasan Luasan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang tersedia x100%	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Sasaran 1: Meningkatkan akses rumah layak huni	1.1	Persentase jumlah rumah tangga yang memiliki akses rumah layak huni	%	Penyediaan rumah tangga yang memiliki akses rumah layak huni	[Jumlah rumah tangga - (jumlah backlog dan RTLH - (Jumlah penanganan RTLH+ penanganan bencana + pembangunan baru)]/jumlah rumah tangga	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Sasaran 2: Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman	2.1	Persentase Permukiman LayakHuni	%	Penyediaan Permukiman yang layak huni	(Luas permukiman - luas sisa kawasan kumuh tahun n) / luas permukiman kabupaten	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Sasaran 3: Meningkatkan tata kelola pertanahan untuk pembangunan kabupaten	3.1	Persentase tata kelola pertanahan untuk pembangunan kabupaten	%	Penyediaan lahan yang digunakan untuk pembangunan	Jumlah bidang tanah aset yang telah dipasang papan/jumlah tanah aset Perkim keseluruhan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Sasaran 4:	4.1	Nilai SAKIP	angka	Penilaian akuntabilitas	(30% x Nilai Perencanaan) + (30% x Nilai Pengukuran) + (15% x Nilai Pelaporan) + ( 25% x Nilai Evaluasi)	Dinas Perumahan Rakyat dan

Meningkatnya Akuntabilitas dan Kualitas Pelayanan Publik				kinerja perangkat daerah		Kawasan Permukiman
	4.2	Indeks Kepuasan Masyarakat	skor	Tingkat kepuasan msyarakat terhadap layanan dinas	Nilai Parameter = nilai rata-rata per parameter x (Jumlah bobot: Jumlah parameter) Nilai IKM = (Jumlah Indeks per Parameter : Jumlah parameter) x 25	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

*Sumber : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Magetan Tahun 2024-2026*

## B. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029 (Berdasarkan RPJMD 2025-2029)

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Magetan merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah dan terintegrasi dengan potensi sumber daya dimiliki dalam hal ini Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Magetan. Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Magetan ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2025-2029.

Adapun Tujuan dan Sasaran Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Magetan yang disusun dalam rangka mendukung Visi dan Misi Bupati Magetan, Tujuan dan Sasaran Strategis serta Strategi dan Arah Kebijakan yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Magetan periode 2025-2029 dapat dirumuskan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.5  
Keterkaitan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Magetan  
dengan Visi dan Misi Bupati Magetan  
Tahun 2025-2029

Visi (RPJMD): Magetan Nyaman, Maju dan Berkelanjutan
Misi (RPJMD) ke- 4 Meningkatkan Kesejahteraan dengan pengentasan Kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat, perlindungan sosial dan pembangunan wilayah perdesaan
Tujuan (RPJMD) ke- 2 Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indikator: <i>Angka Kemiskinan</i>
Sasaran (RPJMD) ke- 3 Mengurangi ketimpangan antar wilayah Indikator: Koefisien GINI
Tujuan (Renstra) ke- 1 Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman dan akses masyarakat terhadap Perumahan Rakyat layak huni Indikator: Persentase permukiman dan perumahan layak huni
Sasaran (Renstra) ke- 2 Meningkatnya kualitas permukiman layak huni Indikator: Persentase permukiman layak huni
<b>Misi (RPJMD) ke-6 Membangun Infrastruktur Strategis untuk Mengurangi Kesenjangan antar Wilayah</b>
Tujuan (RPJMD) ke-2 <i>Berkembangnya Perekonomian Daerah yang Berkelanjutan</i> Indikator: Pertumbuhan Ekonomi
Sasaran (RPJMD) ke- 2 Meningkatnya Pemerataan dan kualitas Infrastruktur Daerah Indikator: Indeks Infrastruktur
Tujuan (Renstra) ke- 1 Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman dan akses masyarakat terhadap Perumahan Rakyat layak huni

Indikator: Persentase permukiman dan perumahan layak huni
Sasaran (Renstra) ke- 1 Meningkatnya penyediaan akses rumah layak huni
Indikator: Persentase jumlah rumah tangga yang memiliki akses rumah layak huni
Tujuan (RPJMD) ke-3 Terciptanya birokrasi pemerintahan yang profesional adaptif dan transparan
Indikator: Indeks Reformasi Birokrasi
Sasaran (RPJMD) ke- 1 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah
Indikator : Nilai SAKIP Pemerintah Daerah
Tujuan (Renstra) ke- 1 Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman dan akses masyarakat terhadap Perumahan Rakyat layak huni
Indikator : Persentase permukiman dan perumahan layak huni
Sasaran (Renstra) ke- 3 dan 4
3. Meningkatkan a tata kelola pertanahan untuk pembangunan kabupaten
4. Meningkatnya Akuntabilitas dan Kualitas Pelayanan Publik
Indikator:
3. Persentase tata kelola pertanahan untuk pembangunan kabupaten
4.1. Nilai SAKIP
4.2. Indeks Kepuasan Masyarakat

### 1. Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja Tahun 2025-2029

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk mendukung keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan dan sasaran strategis beserta indikator dan target kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Magetan periode 2025 – 2029 (Tahun renstra). Tujuan dan Sasaran strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Magetan dijabarkan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.6  
Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja  
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Magetan  
Tahun 2025 - 2029

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA PADA TAHUN RENSTRA					
					2025	2026	2027	2028	2029	

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman dan akses masyarakat terhadap perumahan Rakyat layak huni		Persentase permukiman dan perumahan layak huni	%	88,97	89,09	89,23	89,37	89,51
		1.1	Meningkatnya penyediaan akses rumah layak huni	%	80,18	80,45	80,71	81,16	81,47
		1.2	Meningkatnya kualitas permukiman layak huni	%	80,18	80,45	80,71	81,16	81,47
			Meningkatnya tata kelola pertanahan untuk pembangunan kabupaten	%	15	30	45	60	75
			Meningkatnya Akuntabilitas dan Kualitas Pelayanan Publik	skor	89,6	89,8	90,0	90,2	90,4
			Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	skor	84,2	84,4	84,6	84,8	85,0

Sumber: Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman periode 2025 - 2029

## 2. Strategi dan Arah Kebijakan Tahun 2025 -2029

Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Sementara, kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan. Dalam kerangka tersebut, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Magetan merumuskan strategi dan arah kebijakan perencanaan pembangunan daerah secara komprehensif untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra dengan efektif (berdaya guna) dan efisien (berhasil guna), sebagai berikut:

Tabel 2.7  
Strategi dan Arah Kebijakan  
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Magetan  
Tahun 2025 – 2029

**VISI : Magetan Nyaman, Maju, dan Berkelanjutan**

MISI ke :

**4. Meningkatkan Kesejahteraan dengan pengentasan Kemiskinan melalui pemberdayaan Masyarakat**

**6. Membangun Infrastruktur Strategis untuk Mengurangi Kesenjangan antar Wilayah**

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman dan akses masyarakat terhadap perumahan layak huni	Meningkatnya perumahan dan Permukiman layak huni	Penguatan Basis Data dan Sistem Informasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengembangkan sistem informasi perumahan dan permukiman berbasis digital yang terintegrasi untuk mendukung perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program</li> <li>2. Menyediakan data akurat dan terkini terkait kebutuhan rumah, kualitas lingkungan permukiman, dan status lahan asset publik.</li> </ol>
		Peningkatan Kualitas Lingkungan Permukiman	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mendorong rehabilitasi dan pembangunan infrastruktur dasar permukiman di kawasan prioritas, termasuk penanganan kawasan kumuh</li> <li>2. Menjamin ketersediaan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) yang memadai dan berstandar sesuai NSPK nasional</li> </ol>
		Integrasi Digitalisasi dan Kemitraan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mendorong digitalisasi layanan perizinan dan pelaporan seperti e-siteplan, verifikasi PSU, dan pemetaan aset.</li> <li>2. Menggandeng sektor swasta, komunitas, dan pemangku kepentingan lainnya untuk memperluas cakupan dan keberlanjutan program perumahan</li> </ol>

		Penataan dan Optimalisasi Aset Publik	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menata dan mengelola aset PSU dan lahan publik secara optimal, terdata, dan terdigitalisasi agar pemanfaatannya lebih efektif.</li> <li>2. Menyusun regulasi dan kebijakan turunan yang mendukung tata kelola aset berbasis transparansi dan akuntabilitas</li> </ol>
		Evaluasi dan Penyempurnaan Kebijakan Berbasis Data	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan evaluasi rutin berbasis indikator kinerja untuk menilai efektivitas program dan kegiatan</li> <li>2. Menyempurnakan kebijakan dan program berdasarkan hasil evaluasi dan perkembangan kebutuhan masyarakat</li> </ol>
Meningkatnya Akuntabilitas dan pelayanan publik penyelenggaraan pemerintahan daerah pada Dinas Perumahan Rakyat Kawasan	Meningkatnya Akuntabilitas dan pelayanan publik penyelenggaraan pemerintahan daerah pada Dinas Perumahan Rakyat Kawasan	Meningkatkan kualitas tata kelola administrasi pemerintahan dan pelayanan dinas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan pemenuhan standar pelayanan dan SOP pelayanan</li> <li>2. Meningkatkan ketepatan waktu pelaksanaan administrasi pemerintahan dan pelayanan.</li> </ol>

### 3. Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2025-2029

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah. Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Magetan tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.8**  
**Indikator Kinerja Utama**  
**Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Magetan**  
**Tahun 2025-2029**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	PENJELASAN		
				DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
Saran 1: Meningkatnya penyediaan akses rumah layak huni	1.1	Persentase jumlah rumah tangga yang memiliki akses rumah layak huni	%	Menyediakan akses rumah layak huni bagi rumah tangga	<p>[Jumlah rumah tangga - (jumlah backlog dan RTLH - (Jumlah penanganan RTLH+ penanganan bencana + pembangunan baru))]/jumlah rumah tangga</p> <p>Dimana: Jumlah rumah tangga merupakan keseluruhan unit yang terdiri dari seorang atau beberapa orang, baik memiliki hubungan darah maupun tidak, yang menempati sebagian atau seluruh bangunan dan mengelola kebutuhan sehari-hari dari satu dapur bersama. Data bersumber dari Dinas KB Tahun 2024 sejumlah 224.004 rumah tangga.</p> <p>Backlog adalah kekurangan rumah yang harus dipenuhi agar seluruh rumah tangga memiliki hunian layak. Pada formulasi di atas, yang digunakan adalah data Backlog Kepemilikan dengan definisi jumlah rumah tangga yang belum memiliki rumah</p>	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

					<p>sendiri (masih menumpang, kontrak, kos, dsb). Data bersumber dari Dinas KB Tahun 2024 sejumlah 42.428 rumah tangga.</p> <p>Baseline RTLH merujuk pada data RTLH yang berhasil dihimpun oleh Dinas Perkim sejumlah 3000 rumah tangga.</p> <p>Penanganan RTLH merupakan jumlah penanganan berupa rehabilitasi atau pembangunan RTLH pada tahun n.</p> <p>Jml Rumah Formal didapatkan dari jumlah unit perumahan pengembang yang terbangun pada tahun n.</p>	
Sasaran 2: Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman	2.1	Persentase Permukiman Layak Huni	%	Meciptakan Permukiman yang layak huni	<p>(Luas permukiman - luas sisa kawasan kumuh tahun n) / luas permukiman kabupaten</p> <p>Dimana: Luas Permukiman merupakan luas keseluruhan permukiman kabupaten Magetan (data BPS) Sisa luas kumuh tahun n adalah luas permukiman kumuh sesuai SK kumuh bupati tahun 2025 yang telah dikurangi penanganan pada tahun n</p>	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Sasaran 3: Meningkatnya tata kelola pertanahan untuk pembangunan kabupaten	3.1	Persentase tata kelola pertanahan untuk pembangunan kabupaten	%	Pengelolaan tanah untuk pembangunan	<p>((Jumlah pensertifikatan tahun n/jumlah rencana persertifikatan)+(Luas pemetaan bidang tahun n/luas bidang se Kab Magetan))2</p>	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

					Luas Pemetaan bidang tahun n adalah luas pemetaan bidang tanah yang telah dilaksanakan pada tahun n. Luas bidang se-kab Magetan adalah luas Kabupaten Magetan sesuai data BPN.	
Sasaran 4: Meningkatnya Akuntabilitas dan Kualitas Pelayanan Publik	4.1	Nilai SAKIP	angka	Nilai Sakip	<p>Nilai SAKIP</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bobot 30 komponen perencanaan</li> <li>- Bobot 30 komponen pengukuran kinerja</li> <li>- Bobot 15 komponen pelaporan kinerja</li> <li>- Bobot 25 komponen evaluasi</li> </ul> <p>Komponen Perencanaan yang dinilai :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketersediaan dokumen perencanaan daerah dan Perangkat Daerah</li> <li>2. Dokumen perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (cascading) di setiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting)</li> <li>3. Perencanaan kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan</li> </ol> <p>Komponen Pengukuran yang dinilai:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengukuran kinerja telah dilakukan</li> <li>2. Pengukuran kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan kinerja secara efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan</li> <li>3. Pengukuran kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan</li> </ol>	Inspektorat Daerah

					<p>Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien</p> <p>Komponen Pelaporan, yang dinilai:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaporan Kinerja sesuai dengan sistematika</li> <li>2. Menyampaikan capaian Indikator Kinerja Utama dengan analisa yang lengkap</li> <li>3. LKjIP dijadikan acuan dalam penyusunan dokumen Perencanaan</li> <li>4. Memuat Rencana aksi tahun berikutnya</li> </ol> <p>Komponen Evaluasi, yang dinilai:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kelengkapan dokumen SAKIP</li> <li>2. Keselarasan dokumen perencanaan</li> <li>3. Ketercapaian Kinerja</li> <li>4. LHE ditindaklanjuti</li> <li>5. Menyusun rencana aksi atas tindakanjuti LHE</li> <li>6. LKjIP dijadikan acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan tahun berikutnya</li> </ol>	
	4.2	Indeks Kepuasan Masyarakat	skor	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layananan dinas Perkim	<p>Nilai IKM = (Jumlah Indeks per Parameter/Jumlah parameter) x 25</p> <p>9 (sembilan) parameter Indeks Kepuasan Masyarakat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persyaratan</li> <li>2. Sistem mekanisme dan prosedur</li> <li>3. Waktu penyelesaian</li> <li>4. Biaya/tarif</li> <li>5. Produk spesifikasi jenis pelayanan</li> <li>6. Kompetensi pelaksana</li> </ol>	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

					7. Perilaku pelaksana 8. Penanganan pengaduan, saran dan masukan 9. Sarana dan Prasarana	
--	--	--	--	--	--	--

*Sumber : Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2025-2029*

### C. RENCANA KERJA DAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Rencana Kerja (Renja) Tahunan merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra dan akan dilaksanakan oleh perangkat daerah melalui berbagai kegiatan tahunan. Rencana Kerja Tahun 2025 termuat di dalam dokumen Renja Perangkat Daerah Tahun 2025. Berikut Rencana Kinerja Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Magetan Tahun 2025:

**Tabel 2.9**

#### **Rencana Kerja Tahun 2025**

#### **Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Magetan**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SAT.	TARGET	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
1	Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman dan akses masyarakat terhadap Perumahan Rakyat layak huni		Persentase permukiman dan perumahan layak huni	%	88,97	
		1.1	Meningkatnya penyediaan akses rumah layak huni	Persentase jumlah rumah tangga yang memiliki akses rumah layak huni	%	79,95
			Meningkatnya kualitas permukiman layak huni	Persentase permukiman layak huni	%	97,98
			Meningkatnya tata kelola pertanahan untuk pembangunan kabupaten	Persentase tata kelola pertanahan untuk pembangunan kabupaten	%	-
			Meningkatnya Akuntabilitas dan Kualitas Pelayanan Publik	Nilai SAKIP	Angka	89.4
				Indeks Kepuasan Masyarakat	Skor	83.1

*Sumber: Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Magetan Tahun 2025*

Dalam rangka pencapaian kinerja yang telah ditetapkan, dilaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang telah ditetapkan.

Berikut rincian program dan kegiatan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.10**  
**Program, Kegiatan, dan Pagu Anggaran Tahun 2025**  
**Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**  
**Tahun 2025**

NO	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Anggaran
1	2	3	4	5	6
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kepuasan ASN Perkim terhadap Layanan Kesekretariatan Perkim	Indeks	80	4.965.128.721.00
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Disusun Tepat Waktu	Dokumen	1	61.900.000.00
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	1	29.300.000.00
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	1	32.600.000.00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase serapan anggaran perangkat daerah	%	95	3,915.902.821.00
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	32/12	3,880.902.821.00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	1	35.000,000.00
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai yang Menerima Pelayanan Kepegawaian sesuai Prosedur	Orang	100	65,000,000.00
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan	Orang	25	50,000,000.00

		Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	75	15,000,000.00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran	Laporan	12	246.770.900.00
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	12	15,000,000.00
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	65,625.900.00
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	12	15,000,000.00
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12	26.645.000.00
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12	20,000,000.00
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	12	4.500,000.00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	100,000,000.00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tercukupinya Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerinta Daerah	Laporan	12	362,227,000.00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	35,000,000.00
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	12	63.050,000.00

	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	331.905,000.00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah dan Gedung	Unit	11	245,600,000.00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	10	146,900,000.00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	98,700,000.00
2	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase rumah bagi korban bencana	%	85.7	435.650.000.00
	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Pendataan penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana	Data	1	13,500,000.00
	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana dan Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Dokumen	1	13,500,000.00
	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana/relokasi Kabupaten	dokumen	15	400.150.000.00
	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	dokumen	12	290,650.000.00
	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun	dokumen	3	100,000,000.00
	Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tangga bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Fasilitasi Penyediaan Rumah	dokumen	0	9.500.000,00

	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah Fasilitas bidang Perumahan	dokumen	2	22.000.000.00
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Laporan	4	22.000.000.00
3	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase luasan lingkungan permukiman kumuh kawasan perkotaan yang tertangani	%	3.8	7.102.668.150.00
	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Penataan dan Peningkatan kualitas permukiman	dokumen	1	181.786.050.00
	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi	dokumen	1	86.387.450.00
	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi	dokumen	1	94.398.600.00
	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh	laporan	1	6.920.882.100.00
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Laporan	2	22.013.600.00
	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh	Luas Permukiman Kumuh yang Dipugar	ha	20	6.898.868.500.00
4	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	%	97,33	3.345.605.050.00
	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pencegahan Perumahan dan Permukiman Kumuh	Dokumen	210	3.345.604.050.00

	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	Dokumen	200	3.345.604.050.00
5	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU	%	92	1.814.750.000.00
	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Jumlah Penyelenggaran PSU yang Ditangani	Dokumen	8	1.814.750.000.00
	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	Dokumen	8	1.763.000.000.00
	Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang	Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang	Laporan	4	51.750.000.00
6	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	Persentase penyelesaian pengelolaan tanah	%	90.2	32.500.000.00
	Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	Jumlah data Inventarisasi Tanah Kosong	Dokumen	2	32.500.000.00
	Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong	Jumlah Laporan Tanah Kosong dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota yang Diinventarisasi	Laporan	2	32.500.000.00
7	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase Pengelolaan Tanah Kosong	%	90.2	2.140.200.000.00
	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu daerah kabupaten/ kota	Laporan	2	2.140.200.000.00
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	2	2.140.200.000.00

Sumber: Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2025

Penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Magetan Tahun 2025 mengacu pada dokumen Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Magetan Tahun 2024-2026, dokumen Rencana Kinerja (Renja) Tahun 2025, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2025. Pada tanggal tiga belas bulan Januari tahun duavribu dua puluh lima telah ditetapkan Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Magetan Tahun 2025 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2.11  
Perjanjian Kinerja Tahun 2025  
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Magetan  
Tahun 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	
1	2	3	4	5	
1	Meningkatnya perumahan dan permukiman layak huni	1	Persentase luasan permukiman kumuh yang tertangani	%	4.80
		2	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	%	97.33
		3	Persentase rumah bagi korban bencana	%	91.20
2	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan PSU untuk kepentingan umum penunjang perumahan		Persentase Perumahan yang PSU nya dikelola Pemerintah	%	30
3	Meningkatnya tata kelola pertanahan untuk pembangunan kabupaten	1	Persentase penyelesaian sengketa tanah	%	30
		2	Persentase rencana penatagunaan tanah	%	16.67
		3	Persentase Inventarisasi Tanah Kosong	%	90
4	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah pada Dinas PRKP	1	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan dinas pada Dinas PRKP	Angka	83.1
		2	Nilai SAKIP pada Dinas PRKP	Skor	89,4

Sumber : Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2025

#### D. RENCANA KERJA DAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi sebagai berikut:

1. Terjadi pergantian atau mutasi pejabat;
2. Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran);
3. Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.

Tabel 2.12

#### Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025

#### Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Magetan

NO	TUJUAN	SASARAN		INDIKATOR KINERJA	SAT.	TARGET
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya Kualitas perumahan dan Kawasan permukiman	1.1	Meningkatnya perumahan dan permukiman layak huni	Persentase luasan Permukiman kumuh yang tertangani	%	4,80%
				Cakupan ketersediaan rumah layak huni	%	97,33
				Persentase rumah bagi korban bencana	%	91,20
		1.2	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan PSU untuk kepentingan umum penunjang perumahan	Persentase Perumahan yang PSU nya dikelola Pemerintah	%	30
		1.3	Meningkatnya tata kelola pertanahan untuk pembangunan kabupaten	Persentase penyelesaian sengketa tanah	%	30
				Persentase rencana penatagunaan tanah	%	11.11
				Persentase Inventarisasi Tanah Kosong	%	90
1.4	Meningkatnya	Nilai Indeks Kepuasan	Indeks	83,1		

		Akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah pada Dinas PRKP	Masyarakat (IKM) atas layanan dinas pada Dinas PRKP		
			Nilai SAKIP pada Dinas PRKP	Skor	89.4

Sumber: Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Magetan Tahun 2025

Dalam rangka pencapaian rencana kerja perubahan yang telah ditetapkan, dilaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang telah ditetapkan. Berikut rincian program dan kegiatan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman:

Tabel 2.13  
Program, Kegiatan, dan Pagu Anggaran Perubahan Tahun 2025  
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman  
Tahun 2025

No.	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Anggaran
1	2	3	4	5	6
1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Kepuasan ASN Perkim terhadap Layanan Kesekretariatan Perkim</b>	<b>Indeks</b>	<b>80</b>	<b>4,709,558,717.00</b>
	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Disusun Tepat Waktu</b>	<b>Dokumen</b>	<b>1</b>	<b>43,950,550.00</b>
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	1	20,897,000.00
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	1	23,053,550.00
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase serapan anggaran perangkat daerah</b>	<b>%</b>	<b>95</b>	<b>3,781,322,767.00</b>

	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	32/12	3,756,315,767.00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	1	25,007,000.00
	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Pegawai yang Menerima Pelayanan Kepegawaian sesuai Prosedur</b>	<b>Orang</b>	<b>100</b>	<b>65,000,000.00</b>
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	25	50,000,000.00
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	75	15,000,000.00
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Laporan jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	Laporan	<b>12</b>	<b>211,458,400.00</b>
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	12	15,000,000.00
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	65,624,450.00
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	12	22,370,000.00
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12	32,643,950.00
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12	20,000,000.00

	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	12	5,820,000.00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	50,000,000.00
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Tercukupinya Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerinta Daerah</b>	<b>Laporan</b>	<b>12</b>	<b>362,227,000.00</b>
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	35,000,000.00
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	12	52,170,000.00
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	275,057,000.00
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah dan Gedung</b>	<b>Unit</b>	<b>11</b>	<b>245,600,000.00</b>
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	10	146,900,000.00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	98,700,000.00
2	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN</b>	<b>Persentase rumah bagi korban bencana</b>	<b>%</b>	<b>85.7</b>	<b>413,616,150.00</b>

	<b>Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Pendataan penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana</b>	<b>Data</b>	<b>1</b>	<b>13,500,000.00</b>
	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana dan Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Dokumen	1	13,500,000.00
	<b>Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana/relokasi Kabupaten</b>	<b>dokumen</b>	<b>15</b>	<b>396,291,450.00</b>
	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	dokumen	12	290,291,450.00
	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun	dokumen	3	100,000,000.00
	Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tangga bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Fasilitasi Penyediaan Rumah	dokumen	0	-
	<b>Penerbitan Izin dan Pembangunan dan Pengembangan Perumahan</b>	<b>Jumlah Fasilitasi bidang Perumahan</b>	<b>dokumen</b>	<b>2</b>	<b>9,824,700.00</b>
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Laporan	4	9,824,700.00
3	<b>PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN</b>	<b>Pesentase luasan lingkungan permukiman kumuh kawasan perkotaan yang tertangani</b>	<b>%</b>	<b>3.8</b>	<b>13,615,030,450.00</b>

	<b>Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha</b>	<b>Jumlah Penataan dan Peningkatan kualitas permukiman</b>	<b>dokumen</b>	<b>1</b>	<b>168,342,550.00</b>
	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi	dokumen	1	79,277,800.00
	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi	dokumen	1	89,064,750.00
	<b>Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha</b>	<b>Jumlah peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh</b>	<b>laporan</b>	<b>1</b>	<b>13,446,687,900.00</b>
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Laporan	2	12,819,400.00
	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh	Luas Permukiman Kumuh yang Dipugar	ha	20	13,433,868,500.00
4	<b>PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH</b>	<b>Cakupan ketersediaan rumah layak huni</b>	<b>%</b>	<b>97,33</b>	<b>6,292,664,972.00</b>
	<b>Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Pencegahan Perumahan dan Permukiman Kumuh</b>	<b>Dokumen</b>	<b>210</b>	<b>6,292,664,972.00</b>
	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10	<b>Dokumen</b>	200	6,292,664,972.00

		(Sepuluh) Ha yang Diperbaiki			
5	<b>PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)</b>	<b>Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU</b>	%	<b>92</b>	<b>2,664,903,750.00</b>
	<b>Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan</b>	<b>Jumlah Penyelenggaraan PSU yang Ditangani</b>	<b>Dokumen</b>	<b>8</b>	<b>2,664,903,750.00</b>
	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	<b>Dokumen</b>	8	2,619,000,000.00
	Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang	Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang	Laporan	4	45,903,750.00
6	<b>PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG</b>	<b>Persentase penyelesaian pengelolaan tanah</b>	%	<b>90.2</b>	<b>26,296,250.00</b>
	<b>Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong</b>	<b>Jumlah data Inventarisasi Tanah Kosong</b>	<b>Dokumen</b>	<b>2</b>	<b>26,296,250.00</b>
	Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong	Jumlah Laporan Tanah Kosong dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota yang Diinventarisasi	Laporan	2	26,296,250.00
7	<b>PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH</b>	<b>Persentase Pengelolaan Tanah Kosong</b>	%	<b>90.2</b>	<b>26,100,000.00</b>
	<b>Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah laporan Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu daerah kabupaten/ kota</b>	<b>Laporan</b>	<b>2</b>	<b>26,100,000.00</b>
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	2	26,100,000.00

Sumber: Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2025

Perangkat daerah melakukan penyusunan Perjanjian Kinerja perubahan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Magetan Tahun 2025 mengacu pada dokumen Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Magetan Tahun 2024-2026, dokumen Rencana Kinerja (Renja) Tahun 2025, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2025. Pada tanggal tiga puluh bulan Juni tahun dua ribu puluh lima telah ditetapkan Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Magetan Tahun 2025 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2.14

**Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025**  
**Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Magetan**  
**Tahun 2025**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET
1	2	3		4	5
1	Meningkatnya perumahan dan permukiman layak huni	1	Persentase luasan permukiman kumuh yang tertangani	%	4.8
		2	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	%	97.33
		3	Persentase rumah bagi korban bencana	%	91.2
2	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan PSU untuk kepentingan umum penunjang perumahan	-	Persentase perumahan yang PSU nya yang dikelola pemerintah	%	30
3	Meningkatnya tata kelola pertanahan untuk pembangunan kabupaten	1	Persentase Rencana Penatagunaan tanah	%	11.11
		2	Persentase Inventarisasi Tanah Kosong	%	90
5	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah pada Dinas PRKP	1	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan dinas pada Dinas PRKP	skor	83.1
		2	Nilai SAKIP pada Dinas PRKP	skor	89.40

*Sumber : Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2025*

Beberapa perubahan kebijakan perjanjian kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Pemerintah Kabupaten Magetan adalah:

1. Indikator ke 1 Sasaran ke 3 : Persentase penyelesaian sengketa tanah dihapus
2. Merubah target pada sasaran ke 3 indikator kinerja ke 2 Persentase Rencana Penatagunaan tanah dari 16.67% menjadi 11.11%

### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Kepala SKPD menyusun laporan kinerja tahunan berdasarkan perjanjian kinerja yang disepakati dan menyampaikannya kepada Bupati Magetan, paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Salah satu fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi *output* dan *outcome* yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang (seharusnya) terjadi dengan kinerja yang diharapkan. Pengukuran kinerja ini dilakukan secara berkala (triwulan) dan tahunan. Pengukuran dan perbandingan kinerja dalam laporan kinerja harus cukup menggambarkan posisi kinerja instansi pemerintah.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja. Pengukuran kinerja yang dilakukan masih didasarkan pada Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja makro diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis. Adapun cara menghitung capaian indikator kinerja dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

Rumus 1: Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Persentase tingkat capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Rumus 2: Apabila semakin rendah realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Persentase tingkat capaian} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Sedangkan pemberian atribut pada capaian masing-masing indikator kinerja, dengan kriteria yaitu:

Tabel 3.1  
Kriteria Capaian Kinerja

No	Nilai Capaian Kinerja		Kategori
	%	Keterangan Persentase	
1.	$\geq 100\%$	Sama dengan atau lebih dari 100 persen	Sangat Berhasil
2.	$75\% \text{ s.d} < 100\%$	Tujuh puluh lima persen sampai dengan seratus persen	Berhasil
3.	$55\% \text{ s.d} < 75\%$	Lima puluh lima persen sampai dengan kurang dari tujuh puluh lima persen	Cukup Berhasil
4.	$< 55\%$	Di bawah lima puluh lima persen	Kurang Berhasil

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan. Dalam laporan ini, *Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman* Kabupaten Magetan dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2025 - 2029 maupun Rencana Kerja Tahun 2025. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi Bupati Magetan. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perubahan Perjanjian Kinerja *Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman* Tahun 2025.

## A. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025

### 1. Target dan Realisasi Kinerja (Induk) dan Perubahan Tahun 2025

Tabel 3.2  
Capaian Kinerja (Induk) tahun 2025  
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman  
Tahun 2025

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori
Meningkatnya perumahan dan permukiman layak huni	Persentase luasan Permukiman kumuh yang tertangani	4,80%	3,15%	65.63%	Cukup Berhasil
	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	97,33%	79.95%	82.14%	Berhasil
	Persentase rumah bagi korban bencana	91,20%	85.7%	93.97%	Berhasil
Meningkatnya pemenuhan	Persentase Perumahan yang PSU nya dikelola Pemerintah	30%	30%	100%	Sangat Berhasil

kebutuhan PSU untuk kepentingan umum penunjang perumahan					
Meningkatnya tata kelola pertanahan untuk pembangunan kabupaten	Persentase penyelesaian sengketa tanah	30	0	0	Kurang Berhasil
	Persentase rencana penatagunaan tanah	16.67%	11.11%	66.65	Cukup Berhasil
	Persentase Inventarisasi Tanah Kosong	90%	89.34%	99.27	Berhasil
Meningkatnya Akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah pada Dinas PRKP	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan dinas pada Dinas PRKP	83,1	84.79	102.03%	Sangat Berhasil
	Nilai SAKIP pada Dinas PRKP	89.4	89,88	100.54%	Sangat Berhasil

Tabel 3.3  
Capaian Kinerja (Perubahan) Tahun 2025  
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman  
Tahun 2025

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori
Meningkatnya perumahan dan permukiman layak huni	Persentase luasan permukiman kumuh yang tertangani	4.8%	3.15%	65.63%	Cukup Berhasil
	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	97.33%	79.95%	82.14	Berhasil
	Persentase rumah bagi korban bencana	91.2%	85.7%	93.97	Berhasil
Meningkatnya pemenuhan kebutuhan PSU untuk kepentingan umum penunjang perumahan	Persentase Perumahan yang PSU nya dikelola Pemerintah	30%	30%	100	Sangat Berhasil
Meningkatnya tata kelola pertanahan untuk pembangunan kabupaten	Persentase rencana penatagunaan tanah	11.11%	11.11%	100	Sangat Berhasil
	Persentase Inventarisasi Tanah Kosong	90%	89.34%	99.27	Berhasil
Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah pada Dinas PRKP	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan dinas pada Dinas PRKP	83.1 skor	84.79	102.03	Sangat Berhasil
	Nilai SAKIP pada Dinas PRKP	89.4	89,88	100.54	Sangat Berhasil

Capaian kinerja atas Indikator Kinerja Utama (IKU) dan indikator lain yang relevan yang sudah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dan telah diubah dengan Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Perubahan Rakyat dan Kawasannya Permukiman Kabupaten Magetan tahun 2025 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.4  
Rincian Capaian Kinerja (Perubahan) Tahun 2025  
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman  
Tahun 2025

No	Uraian	Belanja			Capaian Kinerja		
		Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1.	Sasaran Strategis 1 Meningkatnya perumahan dan permukiman layak huni						
	Indikator Kinerja SS						
	Persentase luasan permukiman kumuh yang tertangani				4.8 %	3.15%	65.63
	Cakupan ketersediaan rumah layak huni				97.33 %	79.95%	82.14
	Persentase rumah bagi korban bencana				91.2 %	85.7%	93.97
	Program (1.1.) PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	13.615.030.450	13.433.765.221	98.67	4.8%	3.15%	65.63
	Sasaran Program (1.1.) ( <i>outcome</i> ) Meningkatnya kualitas kawasan permukiman						
	Indikator Kinerja Program Persentase Luas kawasan kumuh dibawah 10 ha yang ditangani						
	Kegiatan (1.1.1.) Peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 Ha	13.446.687.900	13.272.574.371	98.71	38 lokasi	38 lokasi	100
	Sasaran Kegiatan (1.1.1.) ( <i>output</i> ) Terlaksananya pemugaran kawasan permukiman kumuh						
	Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Permukiman kumuh yang dipugar						
	Rincian Output (RO) 1.1.1.1.	12.819.400	12.455.035	97.16	1 laporan	1 Laporan	100

Jumlah laporan hasil koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh Jumlah Permukiman kumuh yang dipugar	13.433.868.500	13.260.199.336	98.71	11.5 ha	11.05ha	100
Kegiatan (1.1.2.) Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 Ha	168.342.550	161.190.850	95.75	1 dokumen	1 dokumen	100
Sasaran Kegiatan (1.1.2.) ( <i>output</i> ) Tersusunnya dokumen bidang PKP						
Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah dokumen bidang PKP						
Rincian Output (RO) 1.1.2.1. Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun /Tereview/Terlegalisasi	79.277.800	76.299.900	96.24	1 laporan	1 laporan	100
Jumlah Dokumen Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	89.064.750	84.890.950	95.31	2 dokumen	2 dokumen	100
Program 1.2 PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	2.664.903.750	2.613.598.130	98.07	97 %	79.95%	82.14
Sasaran Program (1.2.) ( <i>outcome</i> ) Berkurangnya rumah tidak layak huni						
Indikator Kinerja Program Ketersediaan Rumah Layak Huni Persentase RTLH yang tertangani						
Kegiatan (1.2.1.) Pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh pada daerah kabupaten/kota	2.664.903.750	2.613.598.130	98.07	284 unit	284 unit	100
Sasaran Kegiatan (1.2.1.) ( <i>output</i> ) Meningkatnya jumlah rumah layak huni						
Indikator Kinerja Kegiatan						

	Persentase perbaikan rumah tidak layak huni						
	Rincian Output (RO) 1.2.1.1. Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	2.664.903.750	2.613.598.130	98.07	284 unit	284 unit	100
	Program (1.3.) PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	413.616.150	412.514.400	99.73	91.2%	85.7%	93.97
	Sasaran Program (1.2.) ( <i>outcome</i> ) Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan yang terkena relokasi akibat program Pemerintah						
	Indikator Kinerja Program Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni; Persentase perumahan yang memenuhi kriteria SNI atau standar minimum						
	Kegiatan (1.3.1.) Pendataan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten/kota	13.500.000	12.979.700	96.15	3 dokumen	3 dokumen	100
	Sasaran Kegiatan (1.3.1.) ( <i>output</i> ) Terlaksananya identifikasi perumahan dilokasi rawan bencana atau terkena relokasi program kabupaten						
	Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah lokasi hasil identifikasi Perumahan dilokasi rawan bencana atau terkena relokasi program kabupaten						
	Rincian Output (RO) 1.3.1.1.	13.500.000	12.979.700	96.15			100

	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota				1 dokumen	1 dokumen	
	Kegiatan (1.3.2.) Pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten/kota	396.291.450	390.110.200	98.44	20 unit	20 unit	100
	Sasaran Kegiatan (1.3.2.) ( <i>output</i> ) Terlaksananya perbaikan rumah bagi masyarakat terdampak bencana						
	Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah perbaikan rumah bagi masyarakat terdampak bencana						
	Rincian Output (RO) 1.3.2.1. Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	290.291.450	290.111.150	99.94	13 unit	13 unit	100
	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun	100.000.000	99.999.050	100	2 unit	2 unit	100
	Jumlah Rumah Tangga yang Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota Yang Mendapatkan Fasilitas Penyediaan Rumah	0	0	0	0		
	Kegiatan (1.3.3.) Penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan	9.824.700	9.424.500	95.93	2 dokumen	2 dokumen	100
	Sasaran Kegiatan (1.2.3.) ( <i>output</i> ) Terlaksananya Pembangunan perumahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; Terlaksananya pengendalian terhadap akses perumahan MBR						
	Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Kesesuaian Pembangunan Perumahan dengan dokumen siteplan						
	Rincian Output (RO) 1.3.3.1. Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan	9.824.700	9.424.500	95.93	3 dokumen	3 dokumen	100

	dan Pengembangan Perumahan						
2.	Sasaran Strategis 2 Meningkatnya akses rumah layak huni						
	Indikator Kinerja SS Persentase jumlah rumah tangga yang memiliki akses rumah layak huni						
	Program (3.1.) PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	2.664.903.750	2.613.598.130	98.07	30 %	30 %	100
	Sasaran Program (3.1.) ( <i>outcome</i> ) Meningkatnya penyediaan PSU Permukiman						
	Indikator Kinerja Program Persentase permukiman yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum)						
	Kegiatan (3.1.1.) Urusan penyelenggaraan PSU perumahan	2.664.903.750	2.613.598.130	98.07	8 lokasi	8 lokasi	100
	Sasaran Kegiatan (3.1.1.) ( <i>output</i> ) Meningkatnya pemenuhan kebutuhan PSU untuk kepentingan umum penunjang perumahan						
	Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Perumahan yang PSU nya dikelola Pemerintah						
	Rincian Output (RO) 3.1.1.1. Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	2.619.000.000	2.567.747.280	98.04	14 lokasi	14 lokasi	100
	Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Permukiman yang Terverifikasi dari Pengembang	45.903.750	45.850.850	99.88	1 laporan	1 laporan	100
4	Sasaran Strategis 4 Meningkatnya pemenuhan kebutuhan tanah						

	untuk kepentingan umum penunjang perumahan dan kawasan permukiman						
	Indikator Kinerja SS Persentase pengelolaan tanah yang tersedia untuk kepentingan umum penunjang perumahan dan kawasan permukiman						
	Program (4.1.) PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	26.296.250	21.281.250	80.93	90 %	89.34%	99.27
	Sasaran Program (4.1.) ( <i>outcome</i> ) Meningkatnya pengelolaan tanah kosong						
	Indikator Kinerja Program Persentase Tanah Kosong yang dikelola						
	Kegiatan (4.1.1.) Inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong	26.296.250	21.281.250	80.93	1 laporan	1 laporan	100
	Sasaran Kegiatan (4.1.1.) ( <i>output</i> ) Meningkatnya inventarisasi tanah kosong						
	Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Inventarisasi Tanah Kosong						
	Rincian Output (RO) 4.1.1.1. Jumlah Laporan Tanah Kosong dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota Yang Diinventarisasi	26.296.250	21.281.250	80.93	1 laporan	1 laporan	100
	Program (4.2.) PROGRAM PENATAGUNAAN TANA H	26.100.000	20.317.150	77.84	11.11%	11.11%	100
	Sasaran Program (4.2.) ( <i>outcome</i> ) Meningkatnya tertib pertanahan dan kepastian hukum bagi pemegang hak atas tanah						
	Indikator Kinerja Program Persentase Luas Konsolidasi tanah						
	Kegiatan (4.2.1.)						

	Penggunaan tanah yang hamparannya dalam satu daerah kabupaten/kota	26.100.000	20.317.150	77.84	1 dokumen	1 dokumen	100
	Sasaran Kegiatan (4.1.1.) ( <i>output</i> ) Meningkatnya penatagunaan tanah						
	Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Penatagunaan tanah						
	Rincian Output (RO) 4.2.1.1. Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	26.100.000	20.317.150	77.84	1 dokumen	1 dokumen	100
5.	Sasaran Strategis 5 Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah pada Dinas PRKP						
	Indikator Kinerja SS Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan dinas pada Dinas PRKP Nilai SAKIP pada Dinas PRKP				83.1 skor 89.40 skor	84.79 89.88	102 100
	Program (5.1.) PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.709.558.717	4.425.388.724	93.97	83.1 skor 89.40 skor	84.79 89.88	102 100
	Sasaran Program (5.1.) ( <i>outcome</i> ) Meningkatnya kualitas pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman; Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman						
	Indikator Kinerja Program Indeks Kepuasan Layanan Kesekretariatan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Persentase Capaian Kinerja dan Anggaran Dinas						

	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman						
	Kegiatan (5.1.1.) Administrasi Kepegawaian perangkat daerah	65.000.000	49.410.000	76.02	75 orang	40 orang	57
	Sasaran Kegiatan (5.1.1.) ( <i>output</i> ) Meningkatnya Layanan Kepegawaian Perangkat Daerah						
	Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Pegawai yang Menerima Pelayanan Kepegawaian sesuai dengan Prosedur						
	Rincian Output (RO) 5.1.1.1. Jumlah pegawai yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah pegawai yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	50.000.000 15.000.000	49.410.000 0	98.82 0	50 orang 25 orang	40 orang 0	80 0
	Kegiatan (5.1.2.) Administrasi umum perangkat daerah	211.458.400	201.911.124	95.49	12 bulan	12 bulan	100
	Sasaran Kegiatan (5.1.2.) ( <i>output</i> ) Terpenuhinya penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah						
	Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah						
	Rincian Output (RO) 5.1.2.1. Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	15.000.000 65.624.450 22.370.000	14.997.500 59.914.151 19.969.200	99.98 91.30 89.27	1 paket 1 paket 1 paket	1 paket 1 paket 1 paket	100 100 100

Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	32.643.950	32.604.100	99.88	1 paket	1 paket	100
Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	20.000.000	19.999.950	100	1 paket	1 paket	100
Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5.820.000	5.820.000	100	1 paket	1 paket	100
Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50.000.000	48.606.223	97.21	1 paket	1 paket	100
Kegiatan (5.1.3.) Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	362.227.00	338.894.210	93.57	12 bulan	12 bulan	100
Sasaran Kegiatan (5.1.3.) ( <i>output</i> ) Terpenuhinya laporan pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah laporan pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
Rincian Output (RO) 5.1.3.1. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	35.000.000	21.477.210	61.36	12 bulan	12 bulan	100
Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	52.170.000	42.423.000	81.32	12 bulan	12 bulan	100
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	275.057.000	275.042.000	99.99	12 bulan	12 bulan	100
Kegiatan (5.1.4.) Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	245.600.000	229.554.250	93.47	11 unit	11 unit	100
Sasaran Kegiatan (5.1.4.) ( <i>output</i> ) Terlaksananya pemeliharaan Barang Milik Daerah						
Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah unit pemeliharaan barang milik daerah						
Rincian Output (RO) 5.1.4.1. Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau	146.900.000	133.503.450	90.88	10 unit	10 unit	100

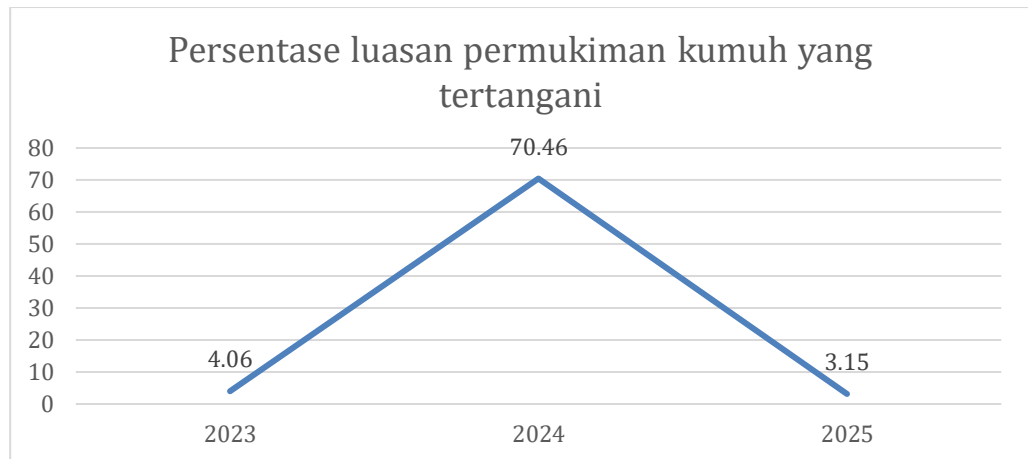
	Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	98.700.000	96.050.800	97.32	1 unit	1 unit	100
	Kegiatan (5.1.5.) Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	43.950.550	43.396.850	98.74	1 dokumen	1 dokumen	100
	Sasaran Kegiatan (5.1.5.) ( <i>output</i> ) Tersusunnya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						
	Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						
	Rincian Output (RO) 5.1.5.1. Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	20.897.000	20.896.850	100	1 dokumen	1 dokumen	100
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	23.053.550	22.500.000	97.60	1 dokumen	1 dokumen	100
	Kegiatan (5.1.6.) Administrasi keuangan perangkat daerah	3.781.322.767	3.562.174.290	94.20	95 %	94.20 %	99.15
	Sasaran Kegiatan (5.1.6.) ( <i>output</i> ) Terpenuhinya serapan anggaran perangkat daerah						
	Indikator Kinerja Kegiatan Persentase deviasi serapan anggaran perangkat daerah						
	Rincian Output (RO) 5.1.6.1. Jumlah pegawai yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	3.756.315.767	3.537.167.540	94.17	33 orang/bulan	33 orang/bulan	100
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	25.007.000	25.006.750	100	20 laporan	20 laporan	100

**2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2025 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;**

Tabel 3.5  
Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

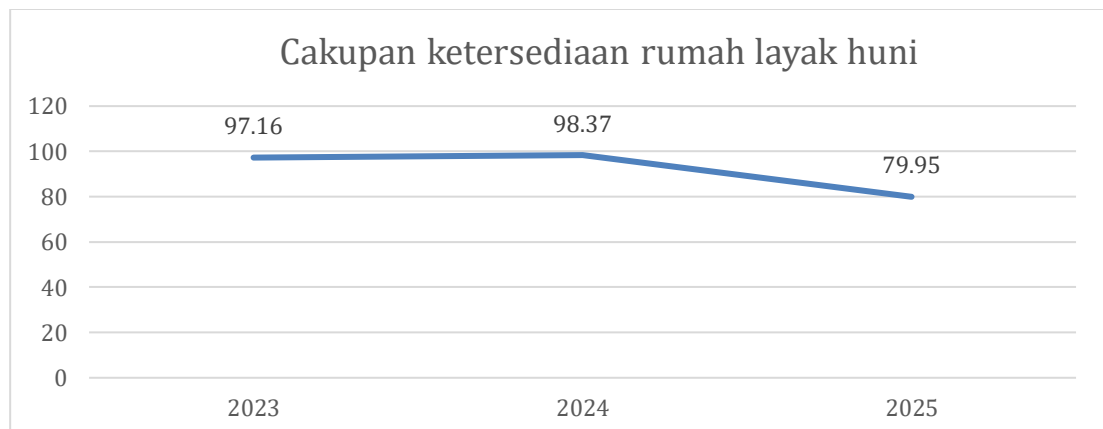
Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun 2023			Tahun 2024			Tahun 2025		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Meningkatnya perumahan dan permukiman layak huni	Persentase luasan permukiman kumuh yang tertangani	3.2	4.06	152.3	4.7	70.46	435.3	4.8	3.15%	65.62
	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	96.6	97.16	100.57	97.22	98.37	101	97.33	79.95%	82.14
	Persentase rumah bagi korban bencana	86	90.90	105.59	91.1	97.14	107	91.2	85.7%	93.97
Meningkatnya pemenuhan kebutuhan PSU untuk kepentingan umum penunjang perumahan	Persentase Perumahan yang PSU nya dikelola Pemerintah	90.6	90.90	100.33	91	100	109.89	30	30%	100%
Meningkatnya tata kelola pertanahan untuk pembangunan kabupaten	Persentase rencana penatagunaan tanah	-	-		-	-		11.11%	11.11%	100
	Persentase Inventarisasi Tanah Kosong	-	-		-	-		90%	89.34%	99.27
Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah pada Dinas PRKP	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan dinas pada Dinas PRKP	79.5	80	106	80	84.8	110	83.1 skor	84.79	102.03
	Nilai SAKIP pada Dinas PRKP	-	-	-	89.10	88.68	99.5	89.4	89,88	100.54

Dalam meningkatkan perumahan dan permukiman yang layak huni seperti pada indikator kinerja ke 1 Sasaran ke 1 Persentase luasan permukiman kumuh yang tertangani. Pemerintah Kabupaten Magetan selalu berupaya untuk meningkatkan capaian kinerja dibuktikan pada tahun 2025 ini tela terealisasi 3.15% dari 4.8% yang ditargetkan sehingga mencapai 65.62% dengan kategori sangat Berhasil sebagaimana yang tergambar pada grafik dibawah ini.



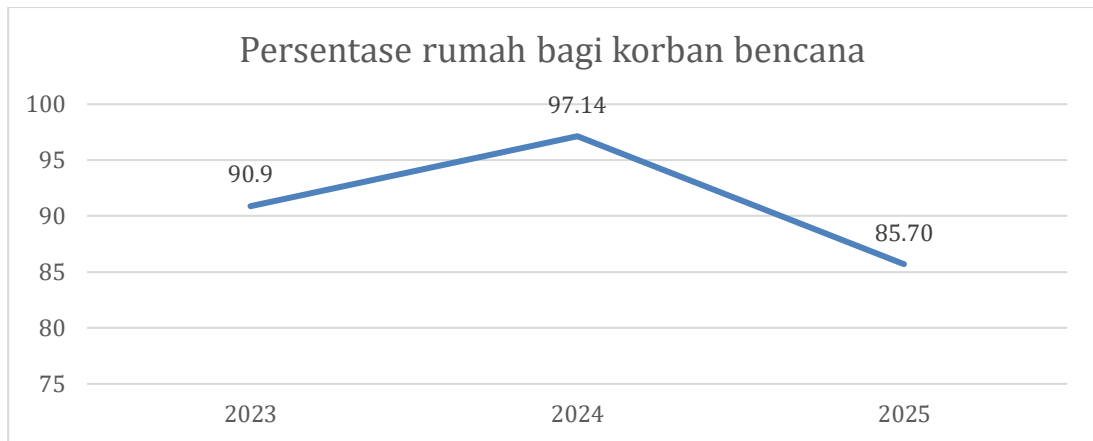
Gambar 1.1: Grafik Persentase luasan permukiman kumuh yang tertangani

Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) merupakan upaya dalam menyediakan rumah layak huni kepada masyarakat yang tersebar di seluruh kecamatan, pada setiap tahun mengalami fluktuasi sesuai dengan ketersediaan anggaran Pemerintah Kabupaten Magetan. Capaiannya melebihi target pada tahun 2023 dan 2024, namun pada tahun 2025 ini realisasinya mengalami penurunan di 79.95% dari target 97,33% dengan capaian 82.14% dan kategori berhasil sebagaimana yang terlihat pada tabel berikut.



Gambar. 1.2. Grafik cakupan ketersediaan rumah layak huni.

Capaian kinerja sasaran strategis ke-1 Indikator ke-3 yaitu Persentase rumah layak huni bagi korban bencana. Layanan penyediaan rumah layak huni bagi korban bencana adalah Standar Pelayanan Minimal (SPM). Pemerintah Kabupaten Magetan merealisasikan kebijakan penerapan Standar Pelayanan Minimal dengan berupaya pemenuhan penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana di Kabupaten Magetan. Pemenuhan pelayanan SPM ini wajib diberikan oleh Pemerintah Daerah dan hak setiap warga negara. Persentase Rumah Korban Bencana yang tertangani ditargetkan sebesar 91,2% dan dapat direalisasikan sebesar 85.7% atau tercapai 93,87% dengan kategori Berhasil. Penurunan capaian persentase rumah layak huni bagi korban bencana dapat dilihat pada grafik berikut.



Gambar 1.3 : Grafik capaian persentase rumah bagi korban bencana

Pada sasaran Meningkatnya pemenuhan kebutuhan PSU untuk kepentingan umum penunjang perumahan terdapat indikator persentase Perumahan yang PSU nya dikelola Pemerintah perumahan dan kawasan permukiman, Pada Tahun 2025 indikator kinerjanya tercapai 100% dengan target 30% dan terealisasi 30% juga.

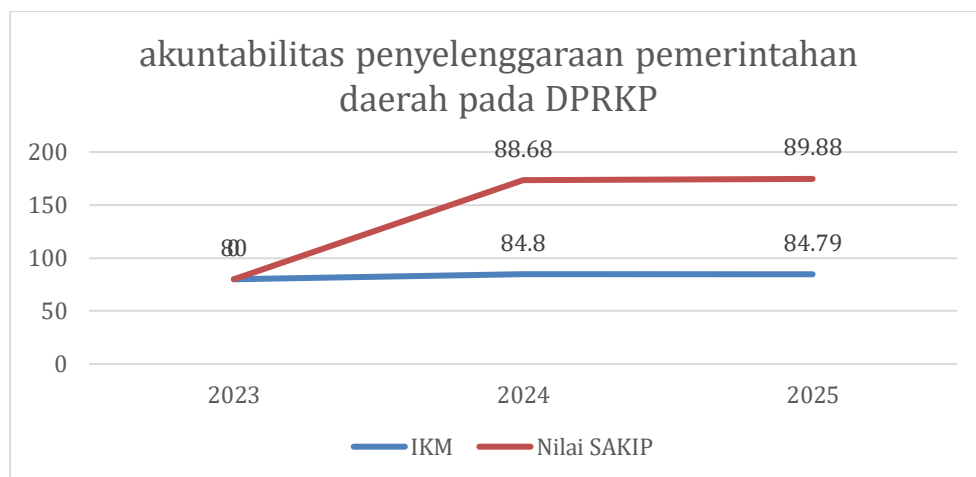


Gambar 2. Grafik Persentase Perumahan yang PSUnya dikelola pemerintah Secara grafik persentase perumahan yang PSU dikelola pemerintah mengalami penurunan, namun hal ini sesuai dengan targetnya pada tahun 2025 dengan kategori berhasil. Salah satunya dipengaruhi oleh kerusakan PSU setiap tahunnya bervariasi tergantung pendataan pada tahun tersebut, dan diusahakan untuk semaksimal mungkin bisa diperbaiki pada tahun berjalan. Perbaikan PSU perumahan yang dapat meningkatkan lingkungan perumahan yang sehat, yang telah dilakukan antara lain perbaikan pagar perumahan yang rubuh, perbaikan ruang terbuka hijau yang kurang memadai dan perbaikan drainase yang rusak.

Sasaran ke 3 terdapat 2 indikator kinerja yang baru pada tahun 2025 ini yaitu Persentase rencana penatagunaan tanah targetnya 11.11% dan terealisasi 11.11% dengan capaian kinerja 100% berhasil dan Persentase Inventarisasi Tanah Kosong yang mempunyai target 90% dan terealisasi 89.34% dengan kategori berhasil pada capaian 99.98%.

Dalam upaya meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Kepala Dinas beserta seluruh pegawai Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman berkomitmen

meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan terus melakukan inovasi, meningkatkan sarana dan prasarana dan meningkatkan kinerja pegawai melalui pengembangan kompetensi. Indikator kinerja pada sasaran ini adalah Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan pada tahun 2024 ditambah dengan indikator Nilai Sakip. Dapat dilihat pada grafik dibawah ini



Gambar 3 ; grafik capaian Nilai SAKIP dan IKM

### 3. Perbandingan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun 2025 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;

Tabel 3.6

Tingkat Kemajuan Capaian Kinerja dengan Akhir Tahun Rencana Strategis

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Target Akhir renstra	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6=4/5*100
1	Meningkatnya perumahan dan permukiman layak huni	Persentase luasan permukiman kumuh yang tertangani	3.15%	4,9%	64.28
		Cakupan ketersediaan rumah layak huni	79.95%	97,44%	82.05
		Persentase rumah bagi korban bencana	85.7%	91,3%	93.72
2	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan PSU untuk kepentingan umum penunjang perumahan	Persentase Perumahan yang PSU nya dikelola Pemerintah	30%	55%	54.54
3	Meningkatnya tata kelola pertanahan untuk pembangunan kabupaten	Persentase rencana penatagunaan tanah	11.11%	33%	33.67
		Persentase Inventarisasi Tanah Kosong	89.34%	50%	178.68
4	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas	84.79	85	99.75

	pemerintahan daerah pada Dinas PRKP	layanan dinas pada Dinas PRKP			
		Nilai SAKIP pada Dinas PRKP	89,88	90,4	99.42

Capaian indikator kinerja pada tahun 2025 terdapat 8 (delapan) indikator kinerja utama yaitu 2 indikator sudah melampaui target akhir renstra 2025-2029 adalah:

1. Persentase luasan permukiman kumuh yang tertangani capaiannya 64.28 % atau melebihi 33.67 % dari yang ditargetkan pada akhir tahun renstra.
2. Persentase Inventarisasi Tanah Kosong capaiannya sebesar 178.68% atau melebihi 39,34% dari targetnya 50%
3. Cakupan ketersediaan rumah layak huni masih kurang 17.49% untuk mencapai target 97.44%
4. Persentase rumah bagi korban bencana masih ada 6.6% lagi untuk mencapai target pada tahun 2029 di angka 91.3%
5. Persentase Perumahan yang PSU nya dikelola Pemerintah pada akhir tahun renstra ditarget pada 55% namun saat ini tahun 2025 baru mencapai 30% masih kurang 25% lagi
6. Persentase rencana penatagunaan tanah ditargetkan pada tahun 2029 sebesar 33% saat ini masih 11.11% masih mengejar ketinggal sebesar 21.89%
7. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) masih 0.21 poin lagi untuk mencapai 85 poin
8. Nilai SAKIP kurang 0.16 poin untuk menuju 90.4 pada tahun 2029

**1. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2025 dengan standar nasional, standar Provinsi atau capaian kinerja Pemerintah Daerah sekitarnya;**

Tabel 3.7

Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional/ Provinsi/ Kabupaten/Kota lain

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2021	Standar Nasional/ Provinsi/ Daerah lain	% Capaian
1	2	3	4	5	6=4/5*100
NIHIL					

**2. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan:**

Tabel 3.8

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Penyebab Keberhasilan/Kegagalan
-------------------	-------------------	--------	-----------	-----------	---------------------------------

Meningkatnya perumahan dan permukiman layak huni	Persentase luasan permukiman kumuh yang tertangani	4.8	3.15%	65.62	- Penanganan kawasan kumuh melibatkan banyak sektor mulai pendanaan sampai dengan partisipasi berbagai sektoral.
	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	97.33	79.95%	82.14	- keterbatasan anggaran sehingga pelaksanaan perbaikan rumah tidak layak huni tahun 2025 belum mencapai angka yang ditargetkan
	Persentase rumah bagi korban bencana	91.2	85.7%	93.97	- keterbatasan alokasi anggaran yang tersedia dibandingkan dengan jumlah kebutuhan penanganan rumah korban bencana - bencana yang bersifat tidak terduga menyebabkan bertambahnya jumlah rumah terdampak
Meningkatnya pemenuhan kebutuhan PSU untuk kepentingan umum penunjang perumahan	Persentase Perumahan yang PSU nya dikelola Pemerintah	30	30%	100%	- koordinasi lintas sektoral. - Inisiatif pengembang untuk melaksanakan kewajiban penyerahan PSU - pemanfaatan website e-siteplan
Meningkatnya tata kelola pertanahan untuk pembangunan kabupaten	Persentase rencana penatagunaan tanah	11.11 %	11.11%	100	- potensi keterlambatan dan ketidaksesuaian data
	Persentase Inventarisasi Tanah Kosong	90%	89.34%	99.27	- keterbatasan informasi serta sumber data yang tersedia di lapangan. - kesulitan akses menuju lokasi inventarisasi. - keterbatasan sarana dan peralatan pendukung. - ketidakakuratan dan belum terintegrasinya basis data

Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah pada Dinas PRKP	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83.1 skor	84.79	102.03	Kurangnya responden yang memberikan umpan balik dalam pelayanan Dinas.
	Nilai SAKIP	89.4	89,88	100.54	Masih adanya ketidakselarasan dalam penyusunan dan penetapan dokumen perencanaan dengan dokumen anggaran.

Indikator persentase luasan permukiman kumuh yang tertangani dengan target sebesar 4,8% telah terealisasi sebesar 3,15%, sehingga capaian kinerja mencapai 65,56% . Ada beberapa Faktor yang mempengaruhi tidak tercapainya pengurangan luasan permukiman kumuh :

1. Pendanaan dan kapasitas implementasi yang terbatas. Pemerintah Daerah fokus pada program prioritas seperti infrastruktur utama, Kesehatan dan pendidikan, sementara penanganan kumuh yang terpadu memerlukan biaya besar dan berkelanjutan.
2. Keberlanjutan Program Setelah Bantuan Eksternal Berakhir, Kabupaten Magetan pernah menjalankan program KOTAKU dengan dukungan eksternal (termasuk fasilitasi masyarakat dan peran Lembaga Keswadayaan Masyarakat/LKM), namun pasca program tidak ada keberlanjutan dalam APBD. Transisi dari program pusat ke penanganan berkelanjutan di daerah masih lemah, sehingga inisiatif pemberdayaan masyarakat yang sempat berjalan tidak berlanjut secara optimal.
3. Penanganan kawasan kumuh idealnya bersifat partisipatif. Masyarakat lokal perlu dilibatkan dalam perencanaan, sumber daya, dan pengawasan program. Namun partisipasi masyarakat tidak optimal karena rendahnya kesadaran, keterbatasan kapasitas (literasi permukiman), serta kurangnya kelembagaan formal yang kuat. Kelembagaan masyarakat yang lemah tersebut memperlambat identifikasi kebutuhan riil dan implementasi solusi jangka panjang.
4. Penanganan kawasan kumuh melibatkan banyak sektor yaitu masalah perumahan sanitasi, infrastruktur, lingkungan, dan tata ruang. Koordinasi antar sektor sering terputus, sehingga program yang dijalankan kurang terpadu. Kerjasama antara Dinas PKP, Bappeda, Dinas PUPR, Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup, serta sektor sosial ekonomi belum berjalan optimal.

Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni didukung oleh program Perumahan dan Permukiman Kawasan Kumuh. Pemerintah Kabupaten Magetan merealisasikan kebijakan dengan mendorong partisipasi dari swasta dan masyarakat untuk bersama-sama dalam meningkatkan cakupan rumah layak huni secara mandiri. Beberapa pemangku kepentingan yang turut bekerjasama dalam mewujudkan rumah layak huni di Kabupaten Magetan yaitu, Komando Distrik Militer 0804 Magetan, Kwarcab

Pramuka dan CSR perusahaan dan berbagai komunitas di Kabupaten Magetan. Pelaksanaan perbaikan rumah tidak layak huni juga memiliki faktor penghambat yaitu keterbatasan anggaran sehingga pelaksanaan perbaikan rumah tidak layak huni tahun 2025 belum mencapai angka yang ditargetkan

Capaian indikator kinerja Persentase rumah bagi korban bencana ini didukung oleh penguatan koordinasi lintas sektoral dengan berbagai pihak terkait, antara lain Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), pemerintah kecamatan dan desa/kelurahan, sehingga proses pendataan, verifikasi, dan penanganan rumah korban bencana dapat dilaksanakan secara lebih cepat dan tepat sasaran. Selain itu, adanya dukungan program bantuan stimulan perumahan yang bersumber dari APBD turut mempercepat pelaksanaan penanganan rumah terdampak bencana.

Meskipun capaian indikator Persentase Rumah Korban Bencana yang Tertangani telah mencapai 93,97%, namun realisasi tersebut belum sepenuhnya mencapai target yang ditetapkan. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor penghambat. Salah satu faktor penghambat adalah keterbatasan alokasi anggaran yang tersedia dibandingkan dengan jumlah kebutuhan penanganan rumah korban bencana, sehingga pelaksanaan penanganan harus dilakukan secara bertahap berdasarkan skala prioritas.

Selain itu, adanya dinamika kejadian bencana yang bersifat tidak terduga menyebabkan bertambahnya jumlah rumah terdampak, sehingga memerlukan penyesuaian perencanaan dan pengalokasian sumber daya. Dengan adanya berbagai faktor tersebut, pelaksanaan penanganan belum sepenuhnya dapat memenuhi target yang ditetapkan pada tahun berjalan, namun tetap menunjukkan capaian kinerja yang optimal.

Keberhasilan pencapaian indikator ini didukung oleh penguatan koordinasi lintas sektoral, antara lain dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN), Bagian Hukum, serta Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD), sehingga berbagai permasalahan yang menjadi kendala dalam proses penyerahan PSU dapat ditangani secara efektif. Selain itu, upaya terus mendorong pengembang untuk melaksanakan kewajiban penyerahan PSU melalui pembinaan, fasilitasi, dan koordinasi intensif turut mempercepat proses penyerahan. Optimalisasi pemanfaatan website e-siteplan yang terus dikembangkan juga memberikan kemudahan bagi pengembang dalam proses penyerahan PSU, sehingga mendukung percepatan pengelolaan PSU oleh Pemerintah Daerah.

Indikator Persentase Rencana Penatagunaan Tanah tercapai 100%, ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan penyusunan rencana penatagunaan tanah telah berjalan sesuai dengan perencanaan yang ditetapkan, baik dari sisi tahapan pelaksanaan maupun pemenuhan kebutuhan data pendukung. Secara analisis, keberhasilan tersebut dipengaruhi oleh optimalisasi proses pengumpulan dan verifikasi data perencanaan yang dilakukan secara bertahap serta penguatan koordinasi dengan instansi terkait dalam penyediaan data dan sinkronisasi informasi spasial. Koordinasi yang efektif turut meminimalkan potensi keterlambatan dan ketidaksesuaian data, sehingga proses penyusunan rencana dapat dilaksanakan secara lebih terarah, efisien,

dan sesuai target kinerja yang telah ditetapkan. Selain itu, adanya pemanfaatan data pendukung yang tersedia serta penentuan prioritas lokasi perencanaan turut berkontribusi terhadap tercapainya indikator secara optimal.

Indikator Persentase Inventarisasi Tanah Kosong dengan target sebesar 90% terealisasi 89,34%, sehingga capaian kinerja belum sepenuhnya memenuhi target yang ditetapkan. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan ini antara lain keterbatasan informasi serta sumber data yang tersedia di lapangan, kesulitan akses menuju lokasi inventarisasi, serta keterbatasan sarana dan peralatan pendukung. Selain itu, ketidakakuratan dan belum terintegrasinya basis data turut mempengaruhi proses verifikasi serta pemutakhiran data inventarisasi tanah kosong.

Sebagai upaya perbaikan, akan dilakukan penguatan koordinasi dengan perangkat daerah terkait serta instansi pertanahan (BPN) melalui Perjanjian Kerja Sama guna memperoleh dukungan data yang lebih lengkap dan akurat. Selanjutnya, direncanakan pemutakhiran dan integrasi basis data secara bertahap, optimalisasi pemanfaatan teknologi pendukung inventarisasi, serta peningkatan ketersediaan sarana dan peralatan kegiatan. Penjadwalan kegiatan lapangan yang lebih efektif dengan mempertimbangkan aksesibilitas lokasi serta pelaksanaan verifikasi lapangan secara bertahap dan berbasis prioritas juga menjadi langkah strategis untuk meningkatkan capaian inventarisasi pada periode berikutnya.

Pada sasaran strategis Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, tidak tercapainya target nilai Sakip disebabkan oleh masih kurang selaras antara perencanaan dengan penyusunan anggaran serta pelaksanaan. Sedangkan keberhasilan capaian kepuasan pelayanan Dinas didukung oleh Peningkatan kecepatan pelayanan, kinerja pegawai dan sarana prasarana penunjangnya.

Alternatif solusi kebijakan yang telah dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan pencapaian kinerja, pada tabel berikut:

Tabel 3.9  
Permasalahan pencapaian kinerja dan Alternatif solusi kebijakan yang telah dilakukan

<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Permasalahan dalam pencapaian Indikator Kinerja</b>	<b>Alternatif Solusi</b>
Meningkatnya perumahan dan permukiman layak huni	Persentase luasan permukiman kumuh yang tertangani	Penanganan kawasan kumuh melibatkan banyak sektor mulai pendanaan sampai dengan partisipasi berbagai sektoral.	Penanganan permasalahan kumuh dilakukan secara terpadu pada suatu Kawasan
	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	keterbatasan anggaran sehingga pelaksanaan perbaikan rumah tidak layak huni tahun 2025 belum mencapai angka yang ditargetkan	- Pendanaan dari berbagai sumber dan dilaksanakan perubahan pada saat PAPBD

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- pemberitahuan kepada calon penerima bantuan</li> <li>- Dilakukan system pendataan berkala</li> </ul>
	Persentase rumah bagi korban bencana	<ul style="list-style-type: none"> <li>- keterbatasan alokasi anggaran yang tersedia dibandingkan dengan jumlah kebutuhan penanganan rumah korban bencana</li> <li>- bencana yang bersifat tidak terduga menyebabkan bertambahnya jumlah rumah terdampak</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- pelaksanaan penanganan harus dilakukan secara bertahap berdasarkan skala prioritas.</li> <li>- penyesuaian perencanaan dan pengalokasian sumber daya</li> </ul>
Meningkatnya pemenuhan kebutuhan PSU untuk kepentingan umum penunjang perumahan	Persentase Perumahan yang PSU nya dikelola Pemerintah	<ul style="list-style-type: none"> <li>- koordinasi lintas sektoral.</li> <li>- Inisiatif pengembang untuk melaksanakan kewajiban penyerahan PSU</li> <li>- pemanfaatan website e-siteplan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penguatan koordinasi lintas sektoral.</li> <li>- Pembinaan, fasilitasi, dan koordinasi intensif turut mempercepat proses penyerahan.</li> <li>- Optimalisasi dan pengembangan website e-siteplan</li> </ul>
Meningkatnya tata kelola pertanahan untuk pembangunan kabupaten	Persentase rencana penatagunaan tanah	potensi keterlambatan dan ketidaksesuaian data	<ul style="list-style-type: none"> <li>- penyediaan data dan sinkronisasi informasi spasial.</li> <li>- penyusunan rencana dapat dilaksanakan secara lebih terarah, efisien</li> <li>- penentuan prioritas lokasi perencanaan</li> </ul>
	Persentase Inventarisasi Tanah Kosong	<ul style="list-style-type: none"> <li>- keterbatasan informasi serta sumber data yang tersedia di lapangan.</li> <li>- kesulitan akses menuju lokasi inventarisasi.</li> <li>- keterbatasan sarana dan peralatan pendukung.</li> <li>- ketidakakuratan dan belum terintegrasinya basis data</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- penguatan koordinasi dengan perangkat daerah</li> <li>- dukungan data yang lebih lengkap dan akurat.</li> <li>- direncanakan pemutakhiran dan integrasi basis data secara bertahap</li> <li>- optimalisasi pemanfaatan teknologi pendukung inventarisasi, serta</li> </ul>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- peningkatan ketersediaan sarana dan peralatan kegiatan. Penjadwalan kegiatan lapangan yang lebih efektif</li> <li>- mempertimbangkan aksesibilitas lokasi serta pelaksanaan verifikasi lapangan secara bertahap dan berbasis prioritas</li> </ul>
Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah pada Dinas PRKP	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Kurangnya responden yang memberikan umpan balik dalam pelayanan Dinas.	Lebih aktif mendorong pengguna layanan/ responden untuk memberikan umpan balik atas pelayanan Dinas, dan melakukan penilaian/ evaluasi setiap semester.
	Nilai SAKIP	Masih adanya ketidakselarasan dalam penyusunan dan penetapan dokumen perencanaan dengan dokumen anggaran.	Melaksanakan penyempurnaan dokumen perencanaan jangka menengah diselaraskan dengan prioritas anggaran sesuai dengan sasaran kinerja dan tanggung jawab Dinas.

Permasalahan dalam pencapaian Indikator Kinerja Persentase rumah layak huni bagi korban bencana dan cakupan ketersediaan rumah layak huni terdapat beberapa permasalahan yang sama yaitu meliputi Pendataan tidak up to date sehingga sistem pendanaan yang terbatas sehingga perlu lakukan upaya pendanaan dari berbagai sumber dana baik pemerintah maupun swasta serta dilaksanakan pendataan secara berkala, selain itu partisipasi berbagai pihak sangat dibutuhkan guna mencapai target.

Luasan kumuh yang tertangani dalam pelaksanaannya terdapat permasalahan yang berupa metode penanganan kumuh yang masih bersifat sectoral. Program terpadu penanganan kumuh dengan melibatkan perangkat daerah terkait sesuai kewenangan dengan sasaran pada suatu Kawasan tertentu dalam waktu yang bersamaan.

## **BAB IV PENUTUP**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Magetan Tahun 2025 ini merupakan pertanggungjawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) yang merupakan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKjIP Tahun 2025 ini dapat menggambarkan pencapaian kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Magetan dan evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai, yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja baik kinerja sasaran, kinerja program, maupun kinerja kegiatan.

### **A. SIMPULAN**

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Magetan telah menetapkan tujuan dan sasaran beserta indikator kinerjanya di dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029 dan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 dalam rangka mendukung Visi dan Misi Bupati Magetan yang termuat dalam RPJMD Kabupaten Magetan Tahun 2025-2029 yang kemudian diturunkan ke dalam Dokumen Perjanjian Kinerja Tahunan yang didalamnya menyajikan Indikator Kinerja Utama yang menggambarkan hasil-hasil yang utama dan kondisi yang seharusnya, tanpa mengesampingkan indikator lain yang relevan. Pada tahun 2025, pengukuran kinerja dilakukan terhadap 1 (satu) tujuan, 4 (empat) sasaran dengan menggunakan 8 (sembilan) indikator kinerja yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Dari 8 (delapan) indikator kinerja yang diukur, hasilnya adalah sebagai berikut :

#### **Sasaran 1:** Meningkatnya perumahan dan permukiman layak huni

- Sasaran ke-1 Meningkatnya perumahan dan permukiman layak huni terdiri dari 3 (tiga) indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar 103, 2% (kategori Berhasil);
- Sebanyak 1 (satu) indikator kinerja telah mencapai target dan sebanyak 2 (dua) indikator kinerja belum mencapai target. Seluruh indikator kinerja telah/tidak mencapai target;
- Sasaran ke-1 didukung oleh 3 (program) Program yang terdiri dari 3 (tiga) indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar 96.78 % (kategori berhasil)
- Sasaran ke-1 didukung oleh 6 (enam) Kegiatan terdiri dari 6 (enam) indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar 96,32% (kategori berhasil)

**Sasaran 2:** Meningkatnya pemenuhan kebutuhan PSU untuk kepentingan umum penunjang perumahan

- Sasaran ke-2 terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar 100% (kategori berhasil);
- Sebanyak 1(satu) indikator kinerja telah mencapai target./Seluruh indikator kinerja telah/tidak mencapai target;
- Sasaran ke-2 didukung oleh 1 (satu) Program yang terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar 97.8 % (kategori berhasil)
- Sasaran ke-2 didukung oleh 2 (dua) Kegiatan terdiri dari 2 (dua) indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar 97.8 % (kategori berhasil)

**Sasaran 3:** Meningkatnya tata kelola pertanahan untuk pembangunan kabupaten

- Sasaran ke-3 terdiri dari 2 (dua) indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar 99.64% (kategori berhasil);
- Sebanyak 2 (dua) indikator kinerja telah mencapai target./Seluruh indikator kinerja telah/tidak mencapai target;
- Sasaran ke-3 didukung oleh 2 (dua) Program yang terdiri dari 2 (dua) indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar 79,39 % (kategori berhasil)
- Sasaran ke-3 didukung oleh 2 (dua) Kegiatan terdiri dari 2 (dua) indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar 79.39 % (kategori berhasil)

**Sasaran 4:** Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah pada Dinas PRKP

- Sasaran ke-4 terdiri dari 2 (dua) indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar 101,42% (kategori sangat berhasil);
- Sebanyak 2 (dua) indikator kinerja telah mencapai target./Seluruh indikator kinerja telah/tidak mencapai target;
- Sasaran ke-4 didukung oleh 1 (satu) Program yang terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar 93,8 % (kategori berhasil)
- Sasaran ke-4 didukung oleh 6 (enam) Kegiatan terdiri dari 6 (enam) indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar 91.78 % (kategori berhasil)

Tabel 4.1

Capaian Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Magetan Tahun 2025

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
Meningkatnya perumahan dan permukiman layak huni	Persentase luasan permukiman kumuh yang tertangani	4.8	6.41%	133,5
	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	97.33	79.95%	82.14%

	Persentase rumah bagi korban bencana	91.2	85.7%	93.97%
Meningkatnya pemenuhan Kebutuhan PSU untuk kepentingan umum penunjang perumahan	Persentase Perumahan yang PSU nya dikelola Pemerintah	30	30%	100%
Meningkatnya tata kelola pertanahan untuk pembangunan kabupaten	Persentase rencana penatagunaan tanah	11.11%	11.11%	100%
	Persentase Inventarisasi Tanah Kosong	90%	89.34%	99.97
Meningkatnya akuntabilitas Penyelenggaraan pemerintahan daerah pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83.1	84.79	102.03
	Nilai SAKIP	89.4	89,88	100.54%
<b>Capaian Kinerja</b>				<b>101.52</b>
				<b>SANGAT BAIK</b>

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian kinerja 4 (empat) sasaran tersebut, secara umum telah mencapai target capaian kinerja dengan capaian kinerja rata-rata sebesar 101.52% dengan serapan anggaran sebesar Rp. 27.213.866.075,- dan mencapai efisiensi kinerja sebesar 5.35%.

Capaian kinerja rata-rata tahun 2025 ini turun jika dibandingkan capaian kinerja tahun 2024 sebesar 62.14 %. Penyebab utama permasalahan ini adalah hal yang bersifat teknis dalam pelaksanaan kegiatan terutama terkait dengan penyediaan rumah layak huni baik bagi rumah tangga maupun korban bencana.

Serapan anggaran tahun 2025 ini naik jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 42 %. Penyebab utama permasalahan ini adalah pelaksanaan kegiatan yg dilaksanakan dengan baik.

## **B. RENCANA AKSI TAHUN 2026**

Atas dasar pencapaian kinerja tahun 2025 tersebut, rencana aksi yang akan dilakukan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Magetan untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerjanya antara lain:

Tabel 4.2  
Rencana Aksi Peningkatan Kinerja  
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Magetan  
Tahun 2026

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Rencana Aksi Tahun 2026
Meningkatnya penyediaan akses rumah layak huni	Persentase jumlah rumah tangga yang memiliki akses rumah layak huni	1. Mewujudkan rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan yang terkena relokasi akibat program Pemerintah; 2. Mewujudkan akses pembangunan dan pengembangan perumahan 3. Menurunkan jumlah rumah tidak layak huni
Meningkatnya kualitas permukiman layak huni	Persentase permukiman layak huni	1. Meningkatkan kualitas kawasan permukiman 2. Meningkatkan penyediaan PSU Permukiman
Meningkatnya tata kelola pertanahan untuk pembangunan kabupaten	Persentase tata kelola pertanahan untuk pembangunan kabupaten	1. Meningkatkan tertibpertanahan dan kepastian hukum bagi pemegang hak atas tanah 2. Meningkatkan pengelolaan tanah kosong
Meningkatnya Akuntabilitas dan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Meningkatkan kualitas pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
	Nilai SAKIP	Mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Atas rencana aksi tersebut, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Magetan menyusun target waktu pencapaian indikator kinerja sasaran Tahun 2026 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.3.  
Target Waktu Pencapaian Indikator Kinerja  
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Magetan  
Tahun 2026

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2026				
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TOTAL
Meningkatnya akses rumah layak huni	Persentase jumlah rumah tangga yang memiliki akses rumah layak huni	0	0	0	80%	80%
Meningkatnya kualitas permukiman layak huni	Persentase permukiman layak huni	0	0	0	97.98%	97.98%
Meningkatnya tata kelola pertanahan untuk pembangunan kabupaten	Persentase tata kelola pertanahan untuk pembangunan kabupaten	0	0	0	15%	15%
Meningkatnya Akuntabilitas dan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	0	0	0	80.20	80.20
	Nilai SAKIP	0	89.6	0	0	89.6

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Magetan ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Magetan kepada pihak-pihak terkait baik para *stakeholders* maupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten Magetan. Harapan kami, dari hasil pengukuran kinerja yang tertuang dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan rencana aksi yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Magetan ini dapat memperbaiki dan meningkatkan kinerja di masa yang akan datang.

Magetan, 5 Maret 2026

KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT  
DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
KABUPATEN MAGETAN



**SUDIRG, ST, MT**  
Pembina Tk. I

NIP. 197003042002121009

## LAMPIRAN

### A. Matriks Renstra RPD dan RPJMD

**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)**  
**1.04.2.10.0.00.01.0000 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN**  
**Tahun 2024 - 2026 Kabupaten Magetan**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
					Program(outcome), Kegiatan (output), dan Sub Kegiatan	2024		2025		2026		
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target		Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman dan akses masyarakat terhadap perumahan layak huni	Meningkatnya penyediaan akses rumah layak huni	1.04.02	1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase perumahan yang memenuhi kriteria SNI atau standar minimum	0%	445.000.000	0%	455.800.000	0%	468.600.000		
				Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100%		100%	100%				

		1.04.02.2.01	1.04.02.2.01 Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah lokasi hasil identifikasi perumahan di lokasi rawan bencana atau terkena relokasi program kabupaten	1 dokumen	15.000.000	1 dokumen	14.000.00 0	1 dokumen	15.000.000	
		1.04.02.2.01. 0009	1.04.02.2.01.0009 Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	1 Dokumen	15.000.000	1 Dokumen	14.000.00 0	1 Dokumen	15.000.000	
		1.04.02.2.03	1.04.02.2.03 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah perbaikan rumah bagi masyarakat terdampak bencana	16 unit rumah	400.000.000	16 unit rumah	411.000.0 00	17 unit rumah	422.000.000	
		1.04.02.2.03. 0001	1.04.02.2.03.0001 Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	13 Unit Rumah	300.000.000	13 Unit Rumah	288.000.0 00	14 Unit Rumah	296.000.000	
		1.04.02.2.03. 0004	1.04.02.2.03.0004 Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun	3 Unit Rumah	100.000.000	3 Unit Rumah	103.000.0 00	3 Unit Rumah	106.000.000	
		1.04.02.2.03. 0008	1.04.02.2.03.0008 Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program			0		20.000.00 0		20.000.000	

			Pemerintah Kabupaten/Kota								
		1.04.02.2.06	1.04.02.2.06 Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Persentase MBR yang mendapat akses perumahan MBR Persentase kesesuaian pembangunan perumahan dengan dokumen siteplan	0% 100%	30.000.000	0% 100%	30.800.000	0% 100%	31.600.000	
		1.04.02.2.06.0003	1.04.02.2.06.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	4 Laporan	30.000.000	4 Laporan	30.800.000	4 Laporan	31.600.000	
		1.04.04	1.04.04 PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase RTLH yang tertangani	20%	0	40%	0	60%	0	
		1.04.04.2.01	1.04.04.2.01 Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perbaikan rumah tidak layak huni	20%	0	40%	0	60%	0	

		1.04.04.2.01.0001	1.04.04.2.01.0001 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	150 Unit Rumah	0	154 Unit Rumah	0	158 Unit Rumah	0	
Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman dan akses masyarakat terhadap perumahan layak huni	Meningkatnya kualitas permukiman layak huni	1.04.03	1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Luas kawasan kumuh dibawah 10 ha yang ditangani	11.86%	6.019.000.000	17.19%	6.095.000.000	23.20%	6.248.000.000	
		1.04.03.2.02	1.04.03.2.02 Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah dokumen bidang PKP	3 Dokumen	0	3 Dokumen	0	3 Dokumen	0	
		1.04.03.2.02.0008	1.04.03.2.02.0008 Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi	1 Dokumen	0	1 Dokumen	0	1 Dokumen	0	

		1.04.03.2.02.0014	1.04.03.2.02.0014 Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	2 Dokumen	0	2 Dokumen	0	2 Dokumen	0	
		1.04.03.2.03	1.04.03.2.03 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah permukiman kumuh yang dipugar	2 Ha	6.019.000.000	2 Ha	6.095.000.000	2 Ha	6.248.000.000	
		1.04.03.2.03.0004	1.04.03.2.03.0004 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	2 Laporan	22.000.000	2 Laporan	23.000.000	2 Laporan	24.000.000	
		1.04.03.2.03.0013	1.04.03.2.03.0013 Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh	Luas Permukiman Kumuh yang Dipugar	2 Ha	5.997.000.000	2 Ha	6.072.000.000	2 Ha	6.224.000.000	
		1.04.05	1.04.05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase permukiman yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum)	35%	3.100.000.000	40%	3.178.000.000	45%	3.258.000.000	
		1.04.05.2.01	1.04.05.2.01 Urusan	Persentase Perumahan yang PSU	35%	3.100.000.000	40%	3.178.000.000	45%	3.258.000.000	

			Penyelenggaraan PSU Perumahan	nya dikelola Pemerintah							
		1.04.05.2.01.0010	1.04.05.2.01.0010 Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang	Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang	4 Laporan	35.500.000	4 Laporan	37.000.000	4 Laporan	38.000.000	
		1.04.05.2.01.0012	1.04.05.2.01.0012 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	13 Lokasi	3.064.500.000	14 Lokasi	3.141.000.000	14 Lokasi	3.220.000.000	
Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman dan akses masyarakat terhadap perumahan layak huni	Meningkatnya tata kelola pertanahan untuk pembangunan kabupaten	2.10.04	2.10.04 PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase terselesaikannya kasus tanah garapan belum bersertifikat yang dilakukan melalui mediasi	0%	0	100%	13.000.000	100%	21.000.000	
		2.10.04.2.01	2.10.04.2.01 Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penyelesaian sengketa tanah	0%	0	100%	13.000.000	100%	21.000.000	
		2.10.04.2.01.0004	2.10.04.2.01.0004 Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	0 Berita Acara	0	1 Berita Acara	13.000.000	1 Berita Acara	21.000.000	
		2.10.08	2.10.08 PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	Persentase Tanah Kosong yang dikelola	10%	400.000.000	20%	400.000.000	30%	403.000.000	

		2.10.08.2.02	2.10.08.2.02 Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	Persentase Inventarisasi Tanah Kosong	10%	400.000.000	20%	400.000.000	30%	403.000.000	
		2.10.08.2.02.0001	2.10.08.2.02.0001 Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong	Jumlah Laporan Tanah Kosong dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota yang Diinventarisasi.	1 Laporan	400.000.000	1 Laporan	400.000.000	1 Laporan	403.000.000	
Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman dan akses masyarakat terhadap perumahan layak huni	Meningkatnya tata kelola pertanahan untuk pembangunan kabupaten	2.10.10	2.10.10 PROGRAM PENAGUNAAN TANAH	Persentase Luas Konsolidasi tanah	11.11%	100.000.000	16.67%	100.000.000	22.22%	103.000.000	
		2.10.10.2.01	2.10.10.2.01 Penggunaan Tanah yang Hambarannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penatagunaan tanah	11.11%	100.000.000	16.67%	100.000.000	22.22%	103.000.000	
		2.10.10.2.01.0003	2.10.10.2.01.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	103.000.000	
	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kualitas Pelayanan Publik	X.XX.01	X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Layanan Kesekretariatan Persentase Capaian Kinerja dan Anggaran	80.20 Skor 95 Persen	4.065.000.000	80.30 Skor 95 Persen	4.168.000.000	80.30 Skor 95 Persen	4.274.000.000	

		X.XX.01.2.01	X.XX.01.2.01 Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penggangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokume n	50.000.000	1 Dokumen	52.000.00 0	1 Dokumen	54.000.000	
		X.XX.01.2.01. 0001	X.XX.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokume n	20.000.000	2 Dokumen	21.000.00 0	2 Dokumen	22.000.000	
		X.XX.01.2.01. 0007	X.XX.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	30.000.000	2 Laporan	31.000.00 0	2 Laporan	32.000.000	
		X.XX.01.2.02	X.XX.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Deviasi Serapan Anggaran Perangkat Daerah	95 Persen	4.015.000.000	95 Persen	4.116.000. 000	95 Persen	4.220.000.00 0	
		X.XX.01.2.02. 0001	X.XX.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	31 Orang/b ulan	3.986.000.000	36 Orang/bul an	4.086.000. 000	36 Orang/bu lan	4.189.000.00 0	
		X.XX.01.2.02. 0007	X.XX.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/S emesteran SKPD	2 Laporan	29.000.000	16 Laporan	30.000.00 0	2 Laporan	31.000.000	
		X.XX.01.2.03	X.XX.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi Barang Milik Daerah	0 laporan	0	1 laporan	0	1 laporan	0	

		X.XX.01.2.03.0006	X.XX.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	0 Laporan	0	1 Laporan	0	1 Laporan	0	
		X.XX.01.2.05	X.XX.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai yang Menerima Pelayanan Kepegawaian sesuai dengan Prosedur	31 Orang	0	31 Orang	0	31 Orang	0	
				Persentase Pegawai yang Meningkatkan Kapasitasnya	90 Persen		90 Persen		90 Persen		
		X.XX.01.2.05.0009	X.XX.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	31 Orang	0	31 Orang	0	31 Orang	0	
		X.XX.01.2.05.0011	X.XX.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	31 Orang	0	31 Orang	0	31 Orang	0	
		X.XX.01.2.06	X.XX.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	0	12 Bulan	0	12 Bulan	0	
		X.XX.01.2.06.0001	X.XX.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	0	1 Paket	0	1 Paket	0	
		X.XX.01.2.06.0002	X.XX.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan	Jumlah Paket Peralatan dan	1 Paket	0	1 Paket	0	1 Paket	0	

			Perlengkapan Kantor	Perlengkapan Kantor yang Disediakan							
		X.XX.01.2.06.0003	X.XX.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	0	1 Paket	0	1 Paket	0	
		X.XX.01.2.06.0004	X.XX.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	0	1 Paket	0	1 Paket	0	
		X.XX.01.2.06.0005	X.XX.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	0	1 Paket	0	1 Paket	0	
		X.XX.01.2.06.0006	X.XX.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	3 Dokumen	0	3 Dokumen	0	3 Dokumen	0	
		X.XX.01.2.06.0009	X.XX.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	0	12 Laporan	0	12 Laporan	0	
		X.XX.01.2.08	X.XX.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	0	12 Bulan	0	12 Bulan	0	
		X.XX.01.2.08.0002	X.XX.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	0	12 Laporan	0	12 Laporan	0	

		X.XX.01.2.08.0003	X.XX.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	0	12 Laporan	0	12 Laporan	0	
		X.XX.01.2.08.0004	X.XX.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	0	12 Laporan	0	12 Laporan	0	
		X.XX.01.2.09	X.XX.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit pemeliharaan Barang Milik Daerah	11 Unit	0	11 Unit	0	11 Unit	0	
		X.XX.01.2.09.0001	X.XX.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	10 Unit	0	10 Unit	0	10 Unit	0	
		X.XX.01.2.09.0010	X.XX.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	0	1 Unit	0	1 Unit	0	

Meningkatnya kualitas perumahan dan kawasan permukiman	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan Tanah untuk kepentingan umum penunjang perumahan dan kawasan permukiman	2.10.04	2.10.04 PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase penyelesaian sengketa tanah	90.20%	0	90.30%	0	90.40%	0
		2.10.04.2.01	2.10.04.2.01 Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian sengketa tanah yang diselesaikan	1 Berita Acara	0	1 Berita Acara	0	1 Berita Acara	0
		2.10.04.2.01.0002	2.10.04.2.01.0002 Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Berita Acara	0	1 Berita Acara	0	1 Berita Acara	0
		2.10.08	2.10.08 PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	Persentase Pengelolaan Tanah Kosong	90.20%	0	90.30%	0	90.40%	0
		2.10.08.2.01	2.10.08.2.01 Penyelesaian Masalah Tanah Kosong	Jumlah Penyelesaian Masalah Tanah Kosong yang ditangani	1 Laporan	0	1 Laporan	0	1 Laporan	0
		2.10.08.2.01.0001	2.10.08.2.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Tanah Kosong di dalam 1 (satu)	Jumlah Laporan Koordinasi dalam rangka Penyelesaian Tanah Kosong	1 Laporan	0	1 Laporan	0	1 Laporan	0

			Daerah Kabupaten/Kota								
		2.10.08.2.02	2.10.08.2.02 Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	Jumlah laporan Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	1 Laporan	0	1 Laporan	0	1 Laporan	0	
		2.10.08.2.02. 0001	2.10.08.2.02.0001 Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong	Jumlah Laporan Tanah Kosong dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota yang Diinventarisasi.	1 Laporan	0	1 Laporan	0	1 Laporan	0	
Meningkatnya kualitas perumahan dan kawasan permukiman	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan Tanah untuk kepentingan umum penunjang perumahan dan kawasan permukiman	2.10.10	2.10.10 PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase penatagunaan tanah	90.20%	0	90.30%	0	90.40%	0	
		2.10.10.2.01	2.10.10.2.01 Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu daerah kabupaten/ kota	1 Laporan	0	1 Laporan	0	1 Laporan	0	
		2.10.10.2.01. 0001	2.10.10.2.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1 Laporan	0	1 Laporan	0	1 Laporan	0	

		2.10.10.2.01.0003	2.10.10.2.01.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	0	1 Dokumen	0	1 Dokumen	0	
	Meningkatnya Akuntabilitas dan Pelayanan Publik penyelenggaraan pemerintahan daerah pada Dinas PRKP	X.XX.01	X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kepuasan ASN Dinas Perkim terhadap layanan kesekretariatan dinas perkim	80%	0	80.10%	0	80.20%	0	
		X.XX.01.2.01	X.XX.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat daerah yang disusun tepat waktu	1 Dokumen	0	1 Dokumen	0	1 Dokumen	0	
		X.XX.01.2.01.0001	X.XX.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	0	1 Dokumen	0	1 Dokumen	0	
		X.XX.01.2.01.0007	X.XX.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	0	1 Laporan	0	1 Laporan	0	
		X.XX.01.2.02	X.XX.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Serapan anggaran perangkat daerah	1%	0	1%	0	1%	0	
		X.XX.01.2.02.0001	X.XX.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	33 Orang/bulan	0	33 Orang/bulan	0	33 Orang/bulan	0	

		X.XX.01.2.02.0007	X.XX.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	20 Laporan	0	20 Laporan	0	20 Laporan	0	
		X.XX.01.2.05	X.XX.01.2.05	Jumlah pegawai yang menerima pelayanan kepegawaian sesuai prosedur	100 Orang	0	100 Orang	0	100 Orang	0	
		X.XX.01.2.05.0009	X.XX.01.2.05.0009	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	25 Orang	0	25 Orang	0	25 Orang	0	
		X.XX.01.2.05.0010	X.XX.01.2.05.0010	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	50 Orang	0	50 Orang	0	50 Orang	0	
		X.XX.01.2.05.0011	X.XX.01.2.05.0011	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	25 Orang	0	25 Orang	0	25 Orang	0	
		X.XX.01.2.06	X.XX.01.2.06	Jumlah penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Paket	0	12 Paket	0	12 Paket	0	
		X.XX.01.2.06.0001	X.XX.01.2.06.0001	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	12 Paket	0	12 Paket	0	12 Paket	0	

			Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bangunan Kantor yang Disediakan							
		X.XX.01.2.06.0002	X.XX.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	0	12 Paket	0	12 Paket	0	
		X.XX.01.2.06.0003	X.XX.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	0	12 Paket	0	12 Paket	0	
		X.XX.01.2.06.0004	X.XX.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	0	12 Paket	0	12 Paket	0	
		X.XX.01.2.06.0005	X.XX.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	0	12 Paket	0	12 Paket	0	
		X.XX.01.2.06.0006	X.XX.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	12 Dokumen	0	12 Dokumen	0	12 Dokumen	0	
		X.XX.01.2.06.0009	X.XX.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	0	12 Laporan	0	12 Laporan	0	
		X.XX.01.2.08	X.XX.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Laporan	0	12 Laporan	0	12 Laporan	0	

	X.XX.01.2.08.0002	X.XX.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	0	12 Laporan	0	12 Laporan	0
	X.XX.01.2.08.0003	X.XX.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	0	12 Laporan	0	12 Laporan	0
	X.XX.01.2.08.0004	X.XX.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	0	12 Laporan	0	12 Laporan	0
	X.XX.01.2.09	X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang dipelihara	11 Unit	0	11 Unit	0	11 Unit	0
	X.XX.01.2.09.0001	X.XX.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	10 Unit	0	10 Unit	0	10 Unit	0
	X.XX.01.2.09.0009	X.XX.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	0	1 Unit	0	1 Unit	0

Meningkatnya kualitas perumahan dan kawasan permukiman	Meningkatnya perumahan dan Permukiman layak huni	1.04.02	1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase rumah bagi korban bencana	88 Persen	365.000.000	89 Persen	365.000.000	90 Persen	365.000.000	
		1.04.02.2.01	1.04.02.2.01 Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah pendataan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten	3 Dokumen	75.000.000	3 Dokumen	75.000.000	3 Dokumen	75.000.000	
		1.04.02.2.01.0003	1.04.02.2.01.0003 Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	1 Dokumen	25.000.000	1 Dokumen	25.000.000	1 Dokumen	25.000.000	
		1.04.02.2.01.0006	1.04.02.2.01.0006 Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus	1 Dokumen	25.000.000	1 Dokumen	25.000.000	1 Dokumen	25.000.000	
		1.04.02.2.01.0007	1.04.02.2.01.0007 Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	1 Dokumen	25.000.000	1 Dokumen	25.000.000	1 Dokumen	25.000.000	

		1.04.02.2.02	1.04.02.2.02 Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah sosialisasi standar tehnik dan persiapan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana	100 Orang	40.000.000	100 Orang	40.000.00 0	100 Orang	40.000.000	
		1.04.02.2.02. 0001	1.04.02.2.02.0001 Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukar elawan Tanggap Bencana	Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota	100 Orang	40.000.000	100 Orang	40.000.00 0	100 Orang	40.000.000	
		1.04.02.2.03	1.04.02.2.03 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana/relokasi kabupaten	20 Unit rumah	250.000.000	20 Unit rumah	250.000.0 00	20 Unit rumah	250.000.000	
		1.04.02.2.03. 0001	1.04.02.2.03.0001 Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	10 Unit Rumah	250.000.000	10 Unit Rumah	250.000.0 00	10 Unit Rumah	250.000.000	
		1.04.02.2.03. 0004	1.04.02.2.03.0004 Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun	10 Unit Rumah	0	10 Unit Rumah	0	10 Unit Rumah	0	
		1.04.02.2.03. 0007	1.04.02.2.03.0007 Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi	Jumlah Rumah Tangga bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang	10 Rumah Tangga	0	10 Rumah Tangga	0	10 Rumah Tangga	0	

			Korban Bencana Kabupaten/Kota	Mendapatkan Fasilitas Penyediaan Rumah							
		1.04.02.2.04	1.04.02.2.04 Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah pendistribusian dan serah terima rumah bagi korban bencana	1 Dokumen	0	1 Dokumen	0	1 Dokumen	0	
		1.04.02.2.04.0005	1.04.02.2.04.0005 Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	1 Dokumen	0	1 Dokumen	0	1 Dokumen	0	
		1.04.02.2.06	1.04.02.2.06 Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah fasilitas bidang perumahan	2 Dokumen	0	2 Dokumen	0	2 Dokumen	0	
		1.04.02.2.06.0003	1.04.02.2.06.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	2 Laporan	0	2 Laporan	0	2 Laporan	0	
		1.04.03	1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase luasan lingkungan kumuh yang tertangani	3.70%	150.000.000	3.80%	150.000.000	3.90%	150.000.000	

		1.04.03.2.02	1.04.03.2.02 Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah penataan dan peningkatan kualitas permukiman	2 Dokumen	0	2 Dokumen	0	2 Dokumen	0	
		1.04.03.2.02.0004	1.04.03.2.02.0004 Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	2 Laporan	0	2 Laporan	0	2 Laporan	0	
		1.04.03.2.02.0008	1.04.03.2.02.0008 Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terelegalisasi	1 Dokumen	0	1 Dokumen	0	1 Dokumen	0	
		1.04.03.2.02.0014	1.04.03.2.02.0014 Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	1 Dokumen	0	1 Dokumen	0	1 Dokumen	0	
		1.04.03.2.03	1.04.03.2.03 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh	100 Unit rumah	150.000.000	100 Unit rumah	150.000.000	100 Unit rumah	150.000.000	
		1.04.03.2.03.0002	1.04.03.2.03.0002 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	100 Unit Rumah	0	100 Unit Rumah	0	100 Unit Rumah	0	

		1.04.03.2.03.0003	1.04.03.2.03.0003 Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	Jumlah Dokumen Kesepakatan Kerja Sama dalam Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	
		1.04.03.2.03.0004	1.04.03.2.03.0004 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	2 Laporan	100.000.000	2 Laporan	100.000.000	2 Laporan	100.000.000	
		1.04.03.2.03.0012	1.04.03.2.03.0012 Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	70 Unit	0	70 Unit	0	70 Unit	0	
		1.04.03.2.03.0013	1.04.03.2.03.0013 Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh	Luas Permukiman Kumuh yang Dipugar	20 Ha	0	20 Ha	0	20 Ha	0	
Meningkatnya kualitas perumahan dan kawasan permukiman	Meningkatnya perumahan dan permukiman layak huni	1.04.04	1.04.04 PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	96.90%	0	97.00%	0	97.30%	0	

		1.04.04.2.01	1.04.04.2.01 Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh	200 Unit rumah	0	200 Unit rumah	0	200 Unit rumah	0	
		1.04.04.2.01.0001	1.04.04.2.01.0001 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	200 Unit Rumah	0	200 Unit Rumah	0	200 Unit Rumah	0	
		1.04.05	1.04.05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Cakupan lingkungan perumahan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU	91%	1.375.000.000	92%	1.375.000.000	93%	1.375.000.000	
		1.04.05.2.01	1.04.05.2.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Jumlah penyelenggaraan PSU	8 Lokasi	1.375.000.000	8 Lokasi	1.375.000.000	8 Lokasi	1.375.000.000	
		1.04.05.2.01.0002	1.04.05.2.01.0002 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang	8 Lokasi	1.275.000.000	8 Lokasi	1.275.000.000	8 Lokasi	1.275.000.000	

			Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Menunjang Fungsi Hunian							
		1.04.05.2.01.0003	1.04.05.2.01.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	2 Laporan	50.000.000	2 Laporan	50.000.000	2 Laporan	50.000.000	
		1.04.05.2.01.0010	1.04.05.2.01.0010 Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang	Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang	1 Laporan	50.000.000	1 Laporan	50.000.000	1 Laporan	50.000.000	

**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)**  
**1.04.2.10.0.00.01.0000 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN**  
**Tahun 2026 - 2030 Kabupaten Magetan**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah
					2026		2027		2028		2029		2030		
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman dan akses masyarakat terhadap perumahan layak huni	Meningkatnya penyediaan akses rumah layak huni	1.04.02	1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase perumahan yang memenuhi kriteria SNI atau standar minimum	0%	445.000.000	0%	455.800.000	0%	468.600.000	0%	481.400.000	0%	495.300.000	
				Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100%		100%		100%		100%				
		1.04.02.2.01	1.04.02.2.01 Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah lokasi hasil identifikasi perumahan di lokasi rawan bencana atau terkena relokasi program kabupaten	1 dokumen	15.000.000	1 dokumen	14.000.000	1 dokumen	15.000.000	1 dokumen	16.000.000	1 dokumen	17.000.000	

		1.04.02.2.01.0009	1.04.02.2.01.0009 Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	1 Dokumen	15.000.000	1 Dokumen	14.000.000	1 Dokumen	15.000.000	1 Dokumen	16.000.000	1 Dokumen	17.000.000	
		1.04.02.2.03	1.04.02.2.03 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah perbaikan rumah bagi masyarakat terdampak bencana	16 unit rumah	400.000.000	16 unit rumah	411.000.000	17 unit rumah	422.000.000	17 unit rumah	433.000.000	18 unit rumah	445.000.000	
		1.04.02.2.03.0001	1.04.02.2.03.0001 Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	13 Unit Rumah	300.000.000	13 Unit Rumah	288.000.000	14 Unit Rumah	296.000.000	14 Unit Rumah	304.000.000	15 Unit Rumah	313.000.000	
		1.04.02.2.03.0004	1.04.02.2.03.0004 Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun	3 Unit Rumah	100.000.000	3 Unit Rumah	103.000.000	3 Unit Rumah	106.000.000	3 Unit Rumah	109.000.000	3 Unit Rumah	112.000.000	
		1.04.02.2.03.0008	1.04.02.2.03.0008 Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Pemerintah			0		20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000	

			Kabupaten/Kota												
		1.04.02.2.06	1.04.02.2.06 Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Persentase MBR yang mendapat akses perumahan MBR	0%	30.000.000	0%	30.800.000	0%	31.600.000	0%	32.400.000	0%	33.300.000	
				Persentase kesesuaian pembangunan perumahan dengan dokumen siteplan	100%		100%		100%		100%		100%		
		1.04.02.2.06.0003	1.04.02.2.06.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	4 Laporan	30.000.000	4 Laporan	30.800.000	4 Laporan	31.600.000	4 Laporan	32.400.000	4 Laporan	33.300.000	
		1.04.04	1.04.04 PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase RTLH yang tertangani	20%	0	40%	0	60%	0	80%	0	100%	0	
		1.04.04.2.01	1.04.04.2.01 Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perbaikan rumah tidak layak huni	20%	0	40%	0	60%	0	80%	0	100%	0	

		1.04.04.2 .01.0001	1.04.04.2.01. 0001 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembang nya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	150 Unit Rumah	0	154 Unit Rumah	0	158 Unit Rumah	0	162 Unit Rumah	0	166 Unit Rumah	0
Meningkatnya a kualitas lingkungan permukiman dan akses masyarakat terhadap perumahan layak huni	Meningkatnya kualitas permukiman layak huni	1.04.03	1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Luas kawasan kumuh dibawah 10 ha yang ditangani	11.86%	6.019.0 00.000	17.19%	6.095.000. 000	23.20%	6.248.00 0.000	29.90%	6.405.0 00.000	37.27%	6.566.00 0.000
		1.04.03.2 .02	1.04.03.2.02 Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah dokumen bidang PKP	3 Dokum en	0	3 Dokum en	0	3 Dokum en	0	3 Dokum en	0	3 Dokume n	0
		1.04.03.2 .02.0008	1.04.03.2.02. 0008 Penyusunan/ Review/Legal isasi	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Te rlegalisasi	1 Dokum en	0	1 Dokum en	0	1 Dokum en	0	1 Dokum en	0	1 Dokume n	0

			Kebijakan Bidang PKP												
		1.04.03.2.02.0014	1.04.03.2.02.0014 Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	2 Dokumen	0	2 Dokumen	0	2 Dokumen	0	2 Dokumen	0	2 Dokumen	0	
		1.04.03.2.03	1.04.03.2.03 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah permukiman kumuh yang dipugar	2 Ha	6.019.000.000	2 Ha	6.095.000.000	2 Ha	6.248.000.000	2 Ha	6.405.000.000	2 Ha	6.566.000.000	
		1.04.03.2.03.0004	1.04.03.2.03.0004 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	2 Laporan	22.000.000	2 Laporan	23.000.000	2 Laporan	24.000.000	2 Laporan	25.000.000	2 Laporan	26.000.000	
		1.04.03.2.03.0013	1.04.03.2.03.0013 Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh	Luas Permukiman Kumuh yang Dipugar	2 Ha	5.997.000.000	2 Ha	6.072.000.000	2 Ha	6.224.000.000	2 Ha	6.380.000.000	2 Ha	6.540.000.000	

		1.04.05	1.04.05 PROGRAM PENINGKAT AN PRASARANA , SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase permukiman yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum)	35%	3.100.0 00.000	40%	3.178.000. 000	45%	3.258.00 0.000	50%	3.340.0 00.000	55%	3.424.00 0.000	
		1.04.05.2 .01	1.04.05.2.01 Urusan Penyelengga raan PSU Perumahan	Persentase Perumahan yang PSU nya dikelola Pemerintah	35%	3.100.0 00.000	40%	3.178.000. 000	45%	3.258.00 0.000	50%	3.340.0 00.000	55%	3.424.00 0.000	
		1.04.05.2 .01.0010	1.04.05.2.01. 0010 Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengemban g	Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang	4 Lapora n	35.500. 000	4 Lapora n	37.000.00 0	4 Lapora n	38.000.0 00	4 Lapora n	39.000. 000	4 Laporan	40.000.0 00	
		1.04.05.2 .01.0012	1.04.05.2.01. 0012 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	13 Lokasi	3.064.5 00.000	14 Lokasi	3.141.000. 000	14 Lokasi	3.220.00 0.000	16 Lokasi	3.301.0 00.000	16 Lokasi	3.384.00 0.000	
Meningkatny a kualitas lingkungan permukiman dan akses masyarakat terhadap perumahan layak huni	Meningkatnya tata kelola pertanahan untuk pembanguna n kabupaten	2.10.04	2.10.04 PROGRAM PENYELESAI AN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase terselesaikannya kasus tanah garapan belum bersertifikat yang dilakukan melalui mediasi	0%	0	100%	13.000.00 0	100%	21.000.0 00	100%	22.000. 000	100%	23.000.0 00	

		2.10.04.2.01	2.10.04.2.01 Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penyelesaian sengketa tanah	0%	0	100%	13.000.000	100%	21.000.000	100%	22.000.000	100%	23.000.000	
		2.10.04.2.01.0004	2.10.04.2.01.0004 Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	0 Berita Acara	0	1 Berita Acara	13.000.000	1 Berita Acara	21.000.000	1 Berita Acara	22.000.000	1 Berita Acara	23.000.000	
		2.10.08	2.10.08 PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	Persentase Tanah Kosong yang dikelola	10%	400.000.000	20%	400.000.000	30%	403.000.000	40%	413.000.000	50%	422.000.000	
		2.10.08.2.02	2.10.08.2.02 Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	Persentase Inventarisasi Tanah Kosong	10%	400.000.000	20%	400.000.000	30%	403.000.000	40%	413.000.000	50%	422.000.000	
		2.10.08.2.02.0001	2.10.08.2.02.0001 Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong	Jumlah Laporan Tanah Kosong dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota yang Diinventarisasi.	1 Laporan	400.000.000	1 Laporan	400.000.000	1 Laporan	403.000.000	1 Laporan	413.000.000	1 Laporan	422.000.000	
Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman dan akses masyarakat terhadap	Meningkatnya tata kelola pertanahan untuk pembangunan kabupaten	2.10.10	2.10.10 PROGRAM PENATAGUN AAN TANAH	Persentase Luas Konsolidasi tanah	11.11%	100.000.000	16.67%	100.000.000	22.22%	103.000.000	27.78%	106.000.000	33.33%	109.000.000	

perumahan layak huni															
		2.10.10.2.01	2.10.10.2.01 Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penatagunaan tanah	11.11%	100.00 0.000	16.67%	100.000.0 00	22.22%	103.000. 000	27.78%	106.00 0.000	33.33%	109.000. 000	
		2.10.10.2.01.0003	2.10.10.2.01.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	100.00 0.000	1 Dokumen	100.000.0 00	1 Dokumen	103.000. 000	1 Dokumen	106.00 0.000	1 Dokumen	109.000. 000	
	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kualitas Pelayanan Publik	X.XX.01	X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	Indeks Kepuasan Layanan Kesekretariatan	80.20 Skor	4.065.0 00.000	80.30 Skor	4.168.000. 000	80.30 Skor	4.274.00 0.000	80.40 Skor	4.382.0 00.000	80.40 Skor	4.493.00 0.000	
				Persentase Capaian Kinerja dan Anggaran	95 Persen		95 Persen		95 Persen		95 Persen		95 Persen		
		X.XX.01.2.01	X.XX.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen	50.000. 000	1 Dokumen	52.000.00 0	1 Dokumen	54.000.0 00	1 Dokumen	56.000. 000	1 Dokumen	58.000.0 00	
		X.XX.01.2.01.0001	X.XX.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	20.000. 000	2 Dokumen	21.000.00 0	2 Dokumen	22.000.0 00	2 Dokumen	23.000. 000	2 Dokumen	24.000.0 00	

			Perencanaan Perangkat Daerah												
		X.XX.01.2.01.0007	X.XX.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	30.000.000	2 Laporan	31.000.000	2 Laporan	32.000.000	2 Laporan	33.000.000	2 Laporan	34.000.000	
		X.XX.01.2.02	X.XX.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Deviasi Serapan Anggaran Perangkat Daerah	95 Persen	4.015.000.000	95 Persen	4.116.000.000	95 Persen	4.220.000.000	95 Persen	4.326.000.000	95 Persen	4.435.000.000	
		X.XX.01.2.02.0001	X.XX.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	31 Orang/bulan	3.986.000.000	36 Orang/bulan	4.086.000.000	36 Orang/bulan	4.189.000.000	36 Orang/bulan	4.294.000.000	36 Orang/bulan	4.402.000.000	
		X.XX.01.2.02.0007	X.XX.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	29.000.000	16 Laporan	30.000.000	2 Laporan	31.000.000	2 Laporan	32.000.000	2 Laporan	33.000.000	
		X.XX.01.2.03	X.XX.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi Barang Milik Daerah	0 laporan	0	1 laporan	0	1 laporan	0	1 laporan	0	1 laporan	0	
		X.XX.01.2.03.0006	X.XX.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	0 Laporan	0	1 Laporan	0	1 Laporan	0	1 Laporan	0	1 Laporan	0	

		X.XX.01.2.05	X.XX.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai yang Menerima Pelayanan Kepegawaian sesuai dengan Prosedur	31 Orang	0	31 Orang	0	31 Orang	0	31 Orang	0	31 Orang	0
				Persentase Pegawai yang Meningkatkan Kapasitasnya	90 Persen		90 Persen		90 Persen		90 Persen		90 Persen	
		X.XX.01.2.05.0009	X.XX.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	31 Orang	0	31 Orang	0	31 Orang	0	31 Orang	0	31 Orang	0
		X.XX.01.2.05.0011	X.XX.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	31 Orang	0	31 Orang	0	31 Orang	0	31 Orang	0	31 Orang	0
		X.XX.01.2.06	X.XX.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	0	12 Bulan	0	12 Bulan	0	12 Bulan	0	12 Bulan	0
		X.XX.01.2.06.0001	X.XX.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	0	1 Paket	0	1 Paket	0	1 Paket	0	1 Paket	0
		X.XX.01.2.06.0002	X.XX.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	0	1 Paket	0	1 Paket	0	1 Paket	0	1 Paket	0

			Perlengkapan Kantor											
		X.XX.01.2.06.0003	X.XX.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	0	1 Paket	0	1 Paket	0	1 Paket	0	1 Paket	0
		X.XX.01.2.06.0004	X.XX.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	0	1 Paket	0	1 Paket	0	1 Paket	0	1 Paket	0
		X.XX.01.2.06.0005	X.XX.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	0	1 Paket	0	1 Paket	0	1 Paket	0	1 Paket	0
		X.XX.01.2.06.0006	X.XX.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	3 Dokumen	0	3 Dokumen	0	3 Dokumen	0	3 Dokumen	0	3 Dokumen	0
		X.XX.01.2.06.0009	X.XX.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	0	12 Laporan	0	12 Laporan	0	12 Laporan	0	12 Laporan	0
		X.XX.01.2.08	X.XX.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	Jumlah laporan pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	0	12 Bulan	0	12 Bulan	0	12 Bulan	0	12 Bulan	0

			Pemerintahan Daerah												
		X.XX.01.2.08.0002	X.XX.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	0	12 Laporan	0	12 Laporan	0	12 Laporan	0	12 Laporan	0	
		X.XX.01.2.08.0003	X.XX.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	0	12 Laporan	0	12 Laporan	0	12 Laporan	0	12 Laporan	0	
		X.XX.01.2.08.0004	X.XX.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	0	12 Laporan	0	12 Laporan	0	12 Laporan	0	12 Laporan	0	
		X.XX.01.2.09	X.XX.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit pemeliharaan Barang Milik Daerah	11 Unit	0	11 Unit	0	11 Unit	0	11 Unit	0	11 Unit	0	
		X.XX.01.2.09.0001	X.XX.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	10 Unit	0	10 Unit	0	10 Unit	0	10 Unit	0	10 Unit	0	

			Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan												
		X.XX.01.2.09.0010	X.XX.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	0	1 Unit	0	1 Unit	0	1 Unit	0	1 Unit	0	
Meningkatnya kualitas perumahan dan kawasan permukiman	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan Tanah untuk kepentingan umum penunjang perumahan dan kawasan permukiman	2.10.04	2.10.04 PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase penyelesaian sengketa tanah	90.20%	0	90.30%	0	90.40%	0	%	0	%	0	
		2.10.04.2.01	2.10.04.2.01 Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian sengketa tanah yang diselesaikan	1 Berita Acara	0	1 Berita Acara	0	1 Berita Acara	0	Berita Acara	0	Berita Acara	0	
		2.10.04.2.01.0002	2.10.04.2.01.0002 Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Berita Acara	0	1 Berita Acara	0	1 Berita Acara	0	Berita Acara	0	Berita Acara	0	

			(satu) Daerah Kabupaten/Kota											
		2.10.08	2.10.08 PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	Persentase Pengelolaan Tanah Kosong	90.20%	0	90.30%	0	90.40%	0	%	0	%	0
		2.10.08.2.01	2.10.08.2.01 Penyelesaian Masalah Tanah Kosong	Jumlah Penyelesaian Masalah Tanah Kosong yang ditangani	1 Laporan	0	1 Laporan	0	1 Laporan	0	Laporan	0	Laporan	0
		2.10.08.2.01.0001	2.10.08.2.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Tanah Kosong di dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dalam rangka Penyelesaian Tanah Kosong	1 Laporan	0	1 Laporan	0	1 Laporan	0	Laporan	0	Laporan	0
		2.10.08.2.02	2.10.08.2.02 Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	Jumlah laporan Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	1 Laporan	0	1 Laporan	0	1 Laporan	0	Laporan	0	Laporan	0
		2.10.08.2.02.0001	2.10.08.2.02.0001 Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong	Jumlah Laporan Tanah Kosong dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota yang Diinventarisasi.	1 Laporan	0	1 Laporan	0	1 Laporan	0	Laporan	0	Laporan	0

Meningkatnya kualitas perumahan dan kawasan permukiman	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan Tanah untuk kepentingan umum penunjang perumahan dan kawasan permukiman	2.10.10	2.10.10 PROGRAM PENATAGUN AAN TANAH	Persentase penatagunaan tanah	90.20%	0	90.30%	0	90.40%	0	%	0	%	0
		2.10.10.2 .01	2.10.10.2.01 Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu daerah kabupaten/ kota	1 Laporan	0	1 Laporan	0	1 Laporan	0	Laporan	0	Laporan	0
		2.10.10.2 .01.0001	2.10.10.2.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1 Laporan	0	1 Laporan	0	1 Laporan	0	Laporan	0	Laporan	0
		2.10.10.2 .01.0003	2.10.10.2.01.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	0	1 Dokumen	0	1 Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0
	Meningkatnya Akuntabilitas dan Pelayanan Publik penyelenggaraan pemerintahan	X.XX.01	X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kepuasan ASN Dinas Perkim terhadap layanan kesekretariatan dinas perkim	80%	0	80.10%	0	80.20%	0	%	0	%	0

	daerah pada Dinas PRKP		KABUPATEN /KOTA												
		X.XX.01.2.01	X.XX.01.2.01 Perencanaan , Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat daerah yang disusun tepat waktu	1 Dokumen	0	1 Dokumen	0	1 Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0	
		X.XX.01.2.01.0001	X.XX.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	0	1 Dokumen	0	1 Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0	
		X.XX.01.2.01.0007	X.XX.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	0	1 Laporan	0	1 Laporan	0	Laporan	0	Laporan	0	
		X.XX.01.2.02	X.XX.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Serapan anggaran perangkat daerah	1%	0	1%	0	1%	0	%	0	%	0	
		X.XX.01.2.02.0001	X.XX.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	33 Orang/bulan	0	33 Orang/bulan	0	33 Orang/bulan	0	Orang/bulan	0	Orang/bulan	0	

		X.XX.01.2.02.0007	X.XX.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	20 Laporan	0	20 Laporan	0	20 Laporan	0	Laporan	0	Laporan	0
		X.XX.01.2.05	X.XX.01.2.05	Jumlah pegawai yang menerima pelayanan kepegawaian sesuai prosedur	100 Orang	0	100 Orang	0	100 Orang	0	Orang	0	Orang	0
		X.XX.01.2.05.0009	X.XX.01.2.05.0009	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	25 Orang	0	25 Orang	0	25 Orang	0	Orang	0	Orang	0
		X.XX.01.2.05.0010	X.XX.01.2.05.0010	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	50 Orang	0	50 Orang	0	50 Orang	0	Orang	0	Orang	0
		X.XX.01.2.05.0011	X.XX.01.2.05.0011	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	25 Orang	0	25 Orang	0	25 Orang	0	Orang	0	Orang	0
		X.XX.01.2.06	X.XX.01.2.06	Jumlah penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Paket	0	12 Paket	0	12 Paket	0	Paket	0	Paket	0

		X.XX.01. 2.06.000 1	X.XX.01.2.06. 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Pener angan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	0	12 Paket	0	12 Paket	0	Paket	0	Paket	0
		X.XX.01. 2.06.000 2	X.XX.01.2.06. 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkap an Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	0	12 Paket	0	12 Paket	0	Paket	0	Paket	0
		X.XX.01. 2.06.000 3	X.XX.01.2.06. 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	0	12 Paket	0	12 Paket	0	Paket	0	Paket	0
		X.XX.01. 2.06.000 4	X.XX.01.2.06. 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	0	12 Paket	0	12 Paket	0	Paket	0	Paket	0
		X.XX.01. 2.06.000 5	X.XX.01.2.06. 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	0	12 Paket	0	12 Paket	0	Paket	0	Paket	0
		X.XX.01. 2.06.000 6	X.XX.01.2.06. 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan yang Disediakan	12 Dokum en	0	12 Dokum en	0	12 Dokum en	0	Dokum en	0	Dokume n	0

		X.XX.01.2.06.0009	X.XX.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	0	12 Laporan	0	12 Laporan	0	Laporan	0	Laporan	0
		X.XX.01.2.08	X.XX.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Laporan	0	12 Laporan	0	12 Laporan	0	Laporan	0	Laporan	0
		X.XX.01.2.08.0002	X.XX.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	0	12 Laporan	0	12 Laporan	0	Laporan	0	Laporan	0
		X.XX.01.2.08.0003	X.XX.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	0	12 Laporan	0	12 Laporan	0	Laporan	0	Laporan	0
		X.XX.01.2.08.0004	X.XX.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	0	12 Laporan	0	12 Laporan	0	Laporan	0	Laporan	0
		X.XX.01.2.09	X.XX.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Jumlah barang milik daerah yang dipelihara	11 Unit	0	11 Unit	0	11 Unit	0	Unit	0	Unit	0

			Pemerintahan Daerah												
		X.XX.01.2.09.0001	X.XX.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	10 Unit	0	10 Unit	0	10 Unit	0	Unit	0	Unit	0	
		X.XX.01.2.09.0009	X.XX.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	0	1 Unit	0	1 Unit	0	Unit	0	Unit	0	
Meningkatnya kualitas perumahan dan kawasan permukiman	Meningkatnya perumahan dan Permukiman layak huni	1.04.02	1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase rumah bagi korban bencana	88 Persen	365.000.000	89 Persen	365.000.000	90 Persen	365.000.000	Persen	0	Persen	0	
		1.04.02.2.01	1.04.02.2.01 Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program	Jumlah pendataan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten	3 Dokumen	75.000.000	3 Dokumen	75.000.000	3 Dokumen	75.000.000	Dokumen	0	Dokumen	0	

			Kabupaten/Kota												
		1.04.02.2.01.0003	1.04.02.2.01.0003 Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	1 Dokumen	25.000.000	1 Dokumen	25.000.000	1 Dokumen	25.000.000	Dokumen	0	Dokumen	0	
		1.04.02.2.01.0006	1.04.02.2.01.0006 Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus	1 Dokumen	25.000.000	1 Dokumen	25.000.000	1 Dokumen	25.000.000	Dokumen	0	Dokumen	0	
		1.04.02.2.01.0007	1.04.02.2.01.0007 Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	1 Dokumen	25.000.000	1 Dokumen	25.000.000	1 Dokumen	25.000.000	Dokumen	0	Dokumen	0	
		1.04.02.2.02	1.04.02.2.02 Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan	Jumlah sosialisasi standar teknis dan persiapan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana	100 Orang	40.000.000	100 Orang	40.000.000	100 Orang	40.000.000	Orang	0	Orang	0	

			Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota											
		1.04.02.2.02.0001	1.04.02.2.02.0001 Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota	100 Orang	40.000.000	100 Orang	40.000.000	100 Orang	40.000.000	Orang	0	Orang	0
		1.04.02.2.03	1.04.02.2.03 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana/relokasi kabupaten	20 Unit rumah	250.000.000	20 Unit rumah	250.000.000	20 Unit rumah	250.000.000	Unit rumah	0	Unit rumah	0
		1.04.02.2.03.0001	1.04.02.2.03.0001 Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	10 Unit Rumah	250.000.000	10 Unit Rumah	250.000.000	10 Unit Rumah	250.000.000	Unit Rumah	0	Unit Rumah	0
		1.04.02.2.03.0004	1.04.02.2.03.0004 Pembangunan	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana	10 Unit Rumah	0	10 Unit Rumah	0	10 Unit Rumah	0	Unit Rumah	0	Unit Rumah	0

			an Rumah bagi Korban Bencana	Kabupaten/Kota yang Terbangun										
		1.04.02.2.03.0007	1.04.02.2.03.0007 Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tangga bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Fasilitasi Penyediaan Rumah	10 Rumah Tangga	0	10 Rumah Tangga	0	10 Rumah Tangga	0	Rumah Tangga	0	Rumah Tangga	0
		1.04.02.2.04	1.04.02.2.04 Pendistribusi an dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah pendistribusian dan serah terima rumah bagi korban bencana	1 Dokum en	0	1 Dokum en	0	1 Dokum en	0	Dokum en	0	Dokume n	0
		1.04.02.2.04.0005	1.04.02.2.04.0005 Penatausaha an Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	1 Dokum en	0	1 Dokum en	0	1 Dokum en	0	Dokum en	0	Dokume n	0
		1.04.02.2.06	1.04.02.2.06 Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah fasilitasi bidang perumahan	2 Dokum en	0	2 Dokum en	0	2 Dokum en	0	Dokum en	0	Dokume n	0

		1.04.02.2.06.0003	1.04.02.2.06.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	2 Laporan	0	2 Laporan	0	2 Laporan	0	Laporan	0	Laporan	0
		1.04.03	1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase luasan lingkungan kumuh yang tertangani	3.70%	150.000.000	3.80%	150.000.000	3.90%	150.000.000	%	0	%	0
		1.04.03.2.02	1.04.03.2.02 Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah penataan dan peningkatan kualitas permukiman	2 Dokumen	0	2 Dokumen	0	2 Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0
		1.04.03.2.02.0004	1.04.03.2.02.0004 Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	2 Laporan	0	2 Laporan	0	2 Laporan	0	Laporan	0	Laporan	0
		1.04.03.2.02.0008	1.04.03.2.02.0008 Penyusunan/Review/Legalisasi	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi	1 Dokumen	0	1 Dokumen	0	1 Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0

			Kebijakan Bidang PKP												
		1.04.03.2.02.0014	1.04.03.2.02.0014 Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	1 Dokumen	0	1 Dokumen	0	1 Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0	
		1.04.03.2.03	1.04.03.2.03 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh	100 Unit rumah	150.00 0.000	100 Unit rumah	150.000.0 00	100 Unit rumah	150.000. 000	Unit rumah	0	Unit rumah	0	
		1.04.03.2.03.0002	1.04.03.2.03.0002 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	100 Unit Rumah	0	100 Unit Rumah	0	100 Unit Rumah	0	Unit Rumah	0	Unit Rumah	0	
		1.04.03.2.03.0003	1.04.03.2.03.0003 Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	Jumlah Dokumen Kesepakatan Kerja Sama dalam Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	1 Dokumen	50.000. 000	1 Dokumen	50.000.00 0	1 Dokumen	50.000.0 00	Dokumen	0	Dokumen	0	
		1.04.03.2.03.0004	1.04.03.2.03.0004 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	2 Laporan	100.00 0.000	2 Laporan	100.000.0 00	2 Laporan	100.000. 000	Laporan	0	Laporan	0	

			Permukiman Kumuh											
		1.04.03.2.03.0012	1.04.03.2.03.0012 Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	70 Unit	0	70 Unit	0	70 Unit	0	Unit	0	Unit	0
		1.04.03.2.03.0013	1.04.03.2.03.0013 Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh	Luas Permukiman Kumuh yang Dipugar	20 Ha	0	20 Ha	0	20 Ha	0	Ha	0	Ha	0
Meningkatnya kualitas perumahan dan kawasan permukiman	Meningkatnya perumahan dan Permukiman layak huni	1.04.04	1.04.04 PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	96.90%	0	97.00%	0	97.30%	0	%	0	%	0
		1.04.04.2.01	1.04.04.2.01 Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh	200 Unit rumah	0	200 Unit rumah	0	200 Unit rumah	0	Unit rumah	0	Unit rumah	0

	1.04.04.2 .01.0001	1.04.04.2.01. 0001	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	200 Unit Rumah	0	200 Unit Rumah	0	200 Unit Rumah	0	Unit Rumah	0	Unit Rumah	0
	1.04.05	1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Cakupan lingkungan perumahan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU	91%	1.375.000.000	92%	1.375.000.000	93%	1.375.000.000	%	0	%	0
	1.04.05.2 .01	1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Jumlah penyelenggaraan PSU	8 Lokasi	1.375.000.000	8 Lokasi	1.375.000.000	8 Lokasi	1.375.000.000	Lokasi	0	Lokasi	0
	1.04.05.2 .01.0002	1.04.05.2.01. 0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	8 Lokasi	1.275.000.000	8 Lokasi	1.275.000.000	8 Lokasi	1.275.000.000	Lokasi	0	Lokasi	0

			Fungsi Hunian												
		1.04.05.2.01.0003	1.04.05.2.01.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	2 Laporan	50.000.000	2 Laporan	50.000.000	2 Laporan	50.000.000	Laporan	0	Laporan	0	
		1.04.05.2.01.0010	1.04.05.2.01.0010 Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang	Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang	1 Laporan	50.000.000	1 Laporan	50.000.000	1 Laporan	50.000.000	Laporan	0	Laporan	0	

**B. Indikator Kinerja Utama RPD dan RPJMD**

TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	PENJELASAN		
				DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
Meningkatnya kualitas perumahan dan kawasan permukiman	1.	Persentase perumahan dan kawasan permukiman yang layak huni	%	Persentase perumahan dan kawasan permukiman yang layak huni	Luasan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang layak Huni tertangan/ Luasan Luasan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang tersedia x100%	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Sasaran 1: Meningkatkan akses rumah layak huni	1.1	Persentase jumlah rumah tangga yang memiliki akses rumah layak huni	%		[Jumlah rumah tangga - (jumlah backlog dan RTLH - (Jumlah penanganan RTLH+ penanganan bencana + pembangunan baru))]/jumlah rumah tangga	
Sasaran 2: Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman	2.1	Persentase Permukiman LayakHuni	%		(Luas permukiman - luas sisa kawasan kumuh tahun n) / luas permukiman kabupaten	
Sasaran 3: Meningkatkan tata kelola pertanahan untuk pembangunan kabupaten	3.1	Persentase tata kelola pertanahan untuk pembangunan kabupaten	%		Jumlah bidang tanah aset yang telah dipasang papan/jumlah tanah aset Perkim keseluruhan	

Sasaran 4: Meningkatnya Akuntabilitas dan Kualitas Pelayanan Publik	4.1	Nilai SAKIP	angka		(30% x Nilai Perencanaan) + (30% x Nilai Pengukuran) + (15% x Nilai Pelaporan) + ( 25% x Nilai Evaluasi)	
	4.2	Indeks Kepuasan Masyarakat	skor		Nilai Parameter = nilai rata-rata per parameter x (Jumlah bobot: Jumlah parameter) Nilai IKM = (Jumlah Indeks per Parameter : Jumlah parameter) x 25	

## INDIKATOR KINERJA UTAMA RPJMD

TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	PENJELASAN		
				DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
Saran 1: Meningkatnya penyediaan akses rumah layak huni	1.1	Persentase jumlah rumah tangga yang memiliki akses rumah layak huni	%	Menyediakan akses rumah layak huni bagi rumah tangga	<p>[Jumlah rumah tangga - (jumlah backlog dan RTLH - (Jumlah penanganan RTLH+ penanganan bencana + pembangunan baru))/jumlah rumah tangga</p> <p>Dimana: Jumlah rumah tangga merupakan keseluruhan unit yang terdiri dari seorang atau beberapa orang, baik memiliki hubungan darah maupun tidak, yang menempati sebagian atau seluruh bangunan dan mengelola kebutuhan sehari-hari dari satu dapur bersama. Data bersumber dari Dinas KB Tahun 2024 sejumlah 224.004 rumah tangga.</p> <p>Backlog adalah kekurangan rumah yang harus dipenuhi agar seluruh rumah tangga memiliki hunian layak. Pada formulasi di atas, yang digunakan adalah data Backlog Kepemilikan dengan definisi jumlah rumah tangga yang belum memiliki rumah sendiri (masih menumpang, kontrak, kos,</p>	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

					<p>dsb). Data bersumber dari Dinas KB Tahun 2024 sejumlah 42.428 rumah tangga.</p> <p>Baseline RTLH merujuk pada data RTLH yang berhasil dihimpun oleh Dinas Perkim sejumlah 3000 rumah tangga.</p> <p>Penanganan RTLH merupakan jumlah penanganan berupa rehabilitasi atau pembangunan RTLH pada tahun n.</p> <p>Jml Rumah Formal didapatkan dari jumlah unit perumahan pengembang yang terbangun pada tahun n.</p>	
Sasaran 2: Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman	2.1	Persentase Permukiman Layak Huni	%	Meciptakan Permukiman yang layak huni	<p>(Luas permukiman - luas sisa kawasan kumuh tahun n) / luas permukiman kabupaten</p> <p>Dimana: Luas Permukiman merupakan luas keseluruhan permukiman kabupaten Magetan (data BPS) Sisa luas kumuh tahun n adalah luas permukiman kumuh sesuai SK kumuh bupati tahun 2025 yang telah dikurangi penanganan pada tahun n</p>	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Sasaran 3: Meningkatnya tata kelola pertanahan untuk pembangunan kabupaten	3.1	Persentase tata kelola pertanahan untuk pembangunan kabupaten	%	Pengelolaan tanah untuk pembangunan	<p>((Jumlah pensertifikatan tahun n/jumlah rencana persertifikatan)+(Luas pemetaan bidang tahun n/luas bidang se Kab Magetan))2</p>	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

					<p>Luas Pemetaan bidang tahun n adalah luas pemetaan bidang tanah yang telah dilaksanakan pada tahun n.</p> <p>Luas bidang se-kab Magetan adalah luas Kabupaten Magetan sesuai data BPN.</p>	
<p>Sasaran 4: Meningkatnya Akuntabilitas dan Kualitas Pelayanan Publik</p>	4.1	Nilai SAKIP	angka	Nilai Sakip	<p>Nilai SAKIP</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bobot 30 komponen perencanaan</li> <li>- Bobot 30 komponen pengukuran kinerja</li> <li>- Bobot 15 komponen pelaporan kinerja</li> <li>- Bobot 25 komponen evaluasi</li> </ul> <p>Komponen Perencanaan yang dinilai :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4. Ketersediaan dokumen perencanaan daerah dan Perangkat Daerah</li> <li>5. Dokumen perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (cascading) di setiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting)</li> <li>6. Perencanaan kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan</li> </ol> <p>Komponen Pengukuran yang dinilai:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4. Pengukuran kinerja telah dilakukan</li> <li>5. Pengukuran kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan kinerja secara efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan</li> </ol>	Inspektorat Daerah

					<p>6. Pengukuran kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien</p> <p>Komponen Pelaporan, yang dinilai:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaporan Kinerja sesuai dengan sistematika</li> <li>2. Menyampaikan capaian Indikator Kinerja Utama dengan analisa yang lengkap</li> <li>3. LKjIP dijadikan acuan dalam penyusunan dokumen Perencanaan</li> <li>4. Memuat Rencana aksi tahun berikutnya</li> </ol> <p>Komponen Evaluasi, yang dinilai:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>7. Kelengkapan dokumen SAKIP</li> <li>8. Keselarasan dokumen perencanaan</li> <li>9. Ketercapaian Kinerja</li> <li>10. LHE ditindaklanjuti</li> <li>11. Menyusun rencana aksi atas tindakanj LHE</li> <li>12. LKjIP dijadikan acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan tahun berikutnya</li> </ol>	
4.2	Indeks Kepuasan Masyarakat	skor	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layananan dinas Perkim	<p>Nilai IKM = (Jumlah Indeks per Parameter/Jumlah parameter) x 25</p> <p>9 (sembilan) parameter Indeks Kepuasan Masyarakat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>10. Persyaratan</li> <li>11. Sistem mekanisme dan prosedur</li> <li>12. Waktu penyelesaian</li> </ol>	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	

					13. Biaya/tarif 14. Produk spesifikasi jenis pelayanan 15. Kompetensi pelaksana 16. Perilaku pelaksana 17. Penanganan pengaduan, saran dan masukan 18. Sarana dan Prasarana	
--	--	--	--	--	--	--

### C. Matriks Renja Tahun 2025 dan Perubahannya

RENJA 2025

NO	TUJUAN	SASARAN		INDIKATOR KINERJA	SAT.	TARGET
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman dan akses masyarakat terhadap Perumahan Rakyat layak huni			Persentase permukiman dan perumahan layak huni	%	88,97
		1.1	Meningkatnya penyediaan akses rumah layak huni	Persentase jumlah rumah tangga yang memiliki akses rumah layak huni	%	79,95
			Meningkatnya kualitas permukiman layak huni	Persentase permukiman layak huni	%	97,98
			Meningkatnya tata kelola pertanahan untuk pembangunan kabupaten	Persentase tata kelola pertanahan untuk pembangunan kabupaten	%	-
			Meningkatnya Akuntabilitas dan Kualitas Pelayanan Publik	Nilai SAKIP	Angka	89.4
		Indeks Kepuasan Masyarakat		Skor	83.1	

RENJA 2025 perubahan

<b>NO</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>		<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>SAT.</b>	<b>TARGET</b>
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya Kualitas perumahan dan Kawasan permukiman	1.1	Meningkatnya perumahan dan permukiman layak huni	Persentase luasan Permukiman kumuh yang tertangani	%	4,80%
				Cakupan ketersediaan rumah layak huni	%	97,33
				Persentase rumah bagi korban bencana	%	91,20
		1.2	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan PSU untuk kepentingan umum penunjang perumahan	Persentase Perumahan yang PSU nya dikelola Pemerintah	%	30
		1.3	Meningkatnya tata kelola pertanahan untuk pembangunan kabupaten	Persentase penyelesaian sengketa tanah	%	30
				Persentase rencana penatagunaan tanah	%	11.11
				Persentase Inventarisasi Tanah Kosong	%	90
		1.4	Meningkatnya Akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah pada Dinas PRKP	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan dinas pada Dinas PRKP	Indeks	83,1
Nilai SAKIP pada Dinas PRKP	Skor			89.4		

**D. Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah Tahun 2025 dan perubahannya**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**

<b>NO</b>	<b>TUJUAN &amp; SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>		<b>SATUAN</b>	<b>TARGET</b>
1	2	3		4	5
1	Meningkatnya perumahan dan permukiman layak huni	1	Persentase luasan permukiman kumuh yang tertangani	%	4.80
		2	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	%	97.33
		3	Persentase rumah bagi korban bencana	%	91.20
2	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan PSU untuk kepentingan umum penunjang perumahan		Persentase Perumahan yang PSU nya dikelola Pemerintah	%	30
3	Meningkatnya tata kelola pertanahan untuk pembangunan kabupaten	1	Persentase penyelesaian sengketa tanah	%	30
		2	Persentase rencana penatagunaan tanah	%	16.67
		3	Persentase Inventarisasi Tanah Kosong	%	90
4	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah pada Dinas PRKP	1	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan dinas pada Dinas PRKP	Angka	83.1
		2	Nilai SAKIP pada Dinas PRKP	Skor	89,4

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 PERUBAHAN

NO	TUJUAN & SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET
1	2	3		4	5
1	Meningkatnya perumahan dan permukiman layak huni	1	Persentase luasan permukiman kumuh yang tertangani	%	4.8
		2	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	%	97.33
		3	Persentase rumah bagi korban bencana	%	91.2
2	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan PSU untuk kepentingan umum penunjang perumahan		Persentase perumahan yang PSU nya yang dikelola pemerintah	%	30
3	Meningkatnya tata kelola pertanahan untuk pembangunan kabupaten	1	Persentase Rencana Penatagunaan tanah	%	11.11
		2	Persentase Inventarisasi Tanah Kosong	%	90
5	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah pada Dinas PRKP	1	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan dinas pada Dinas PRKP	skor	83.1
		2	Nilai SAKIP pada Dinas PRKP	skor	89.40

## E. Pengukuran Kinerja

### PENGUKURAN KINERJA TERHADAP PERJANJIAN KINERJA 2025

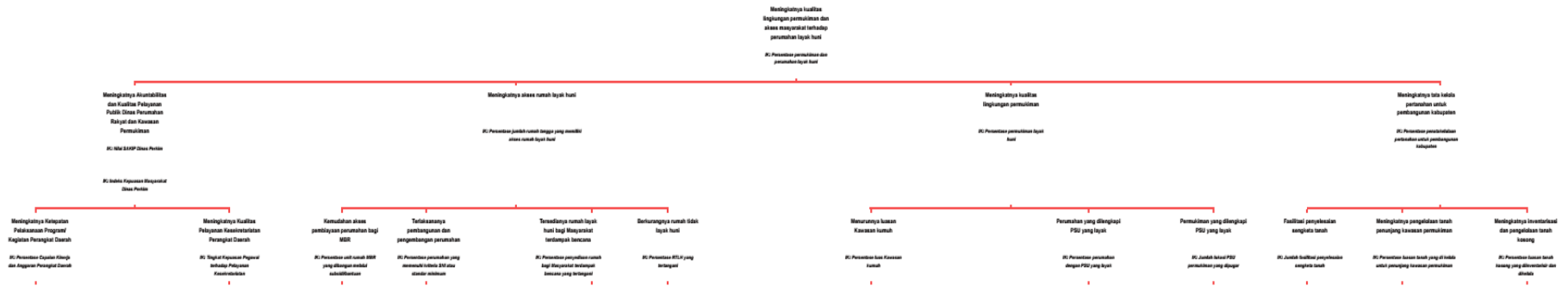
Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori
Meningkatnya perumahan dan permukiman layak huni	Persentase luasan Permukiman kumuh yang tertangani	4,80%	6.41%	133.54	Sangat Berhasil
	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	97,33%	79.95%	82.14	Berhasil
	Persentase rumah bagi korban bencana	91,20%	85.7%	93.97	Berhasil
Meningkatnya pemenuhan kebutuhan PSU untuk kepentingan umum penunjang perumahan	Persentase Perumahan yang PSU nya dikelola Pemerintah	30%	30%	100%	Sangat Berhasil
Meningkatnya tata kelola pertanahan untuk pembangunan kabupaten	Persentase penyelesaian sengketa tanah	30	0	0	Berhasil
	Persentase rencanapenatagunaan tanah	16.67%	11.11%	66.65	Cukup Berhasil
	Persentase Inventarisasi Tanah Kosong	90%	89.34%	99.27	Berhasil
Meningkatnya Akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah pada Dinas PRKP	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan dinas pada Dinas PRKP	83,1	84.79	102.03%	Sangat Berhasil
	Nilai SAKIP pada Dinas PRKP	89.4	89,88	100.54%	Sangat Berhasil

PENGUKURAN KINERJA TERHADAP PERJANJIAN KINERJA 2025 PERUBAHAN

<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian %</b>	<b>Kategori</b>
Meningkatnya perumahan dan permukiman layak huni	Persentase luasan permukiman kumuh yang tertangani	4.8%	6.41%	133.54	Sangat Berhasil
	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	97.33%	79.95%	82.14	Berhasil
	Persentase rumah bagi korban bencana	91.2%	85.7%	93.97	Berhasil
Meningkatnya pemenuhan kebutuhan PSU untuk kepentingan umum penunjang perumahan	Persentase Perumahan yang PSU nya dikelola Pemerintah	30%	30%	100%	Sangat Berhasil
Meningkatnya tata kelola pertanahan untuk pembangunan kabupaten	Persentase rencana penatagunaan tanah	11.11%	11.11%	100	Berhasil
	Persentase Inventarisasi Tanah Kosong	90%	89.34%	99.27	Berhasil
Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah pada Dinas PRKP	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan dinas pada Dinas PRKP	83.1	84.79	102.03	Sangat Berhasil
	Nilai SAKIP pada Dinas PRKP	89.4	89,88	100.54	Sangat Berhasil

## F. Pohon Kinerja

# Pohon Kinerja DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN RPJMD 2025 - 2029 (2026 - 2030)



## G. Rencana Aksi Tahun 2026

<b>Tujuan &amp; Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Rencana Aksi Tahun 2026</b>
Meningkatnya penyediaan akses rumah layak huni	Persentase jumlah rumah tangga yang memiliki akses rumah layak huni	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mewujudkan rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan yang terkena relokasi akibat program Pemerintah;</li> <li>2. Mewujudkan akses pembangunan dan pengembangan perumahan</li> <li>3. Menurunkan jumlah rumah tidak layak huni</li> </ol>
Meningkatnya kualitas permukiman layak huni	Persentase permukiman layak huni	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan kualitas kawasan permukiman</li> <li>2. Meningkatkan penyediaan PSU Permukiman</li> </ol>
Meningkatnya tata kelola pertanahan untuk pembangunan kabupaten	Persentase tata kelola pertanahan untuk pembangunan kabupaten	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan tertib pertanahan dan kepastian hukum bagi pemegang hak atas tanah</li> <li>2. Meningkatkan pengelolaan tanah kosong</li> </ol>
Meningkatnya Akuntabilitas dan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Meningkatkan kualitas pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
	Nilai SAKIP	Mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman